

**Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan
(P2kp) Di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Administrasi Publik

Minat Utama : Kebijakan Publik



Oleh :

Ahmad Tontowi

NIM :S.240207001

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2010**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang diarahkan untuk peningkatan kualitas kehidupan, baik lahir maupun batin, jasmani dan rohani. Disamping itu karena sifatnya yang multidimensional dengan pembangunan juga akan diupayakan terjadi pemerataan di segala sektor, bidang maupun wilayah. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa hasil pembangunan bangsa Indonesia selama era Orde baru telah dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia terutama apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi, namun demikian dalam kenyataannya pembangunan yang telah dilaksanakan masih banyak ditemui kelemahan-kelemahan baik dari pengelolaan manajemen seperti kebocoran-kebocoran anggaran, maupun pada kualitas hasilnya.

Salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu maka ukuran keberhasilan pembangunan dari suatu pemerintahan adalah mengurangi jumlah orang miskin. Hal ini disebabkan karena kemiskinan merupakan *momok* bagi Negara Dunia Ketiga, karena merupakan masalah sosial terbesar. Hampir di semua negara berkembang, 10 %, 20 %, atau paling banyak 30 % penduduk dapat menikmati hasil pembangunan, sisanya, mayoritas

penduduk hidup melarat. Menurut Korten (2002, 19-21), selama tahun 1980-an terdapat tiga krisis global yang terpatir dalam kesadaran umat manusia. Salah satu krisis tersebut adalah kemiskinan. Selama ini strategi pembangunan yang diterapkan di sebagian besar negara sedang berkembang tidak menyumbang apapun bagi kesejahteraan rakyat miskin. Sebaliknya, malah membuat mereka semakin sengsara (Srahm, 1999, xi-xii). Kondisi yang sama terjadi di negara kita. Meskipun telah banyak upaya penanganan kemiskinan dilakukan khususnya di Indonesia, namun kemiskinan tetap saja merupakan masalah utama. Selama periode tahun 1966 – 1990 angka pertumbuhan ekonomi mencapai 12 persen dan angka kemiskinan menurun menjadi 60 persen. (Holman dkk, 2004). Sedangkan tingkat kemiskinan pada sebelum krisis yaitu pada tahun 1996 adalah 17,6 persen. (Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, 29 : 2006)

Krisis ekonomi yang terjadi, di satu sisi telah mengecilkan arti dari berbagai pencapaian hasil pembangunan, namun di sisi lain membuka cakrawala pemikiran pemerintah bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan perlu dititikberatkan pada upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan akan berjalan secara merata dan berkesinambungan jika bertumpu pada masyarakat, sehingga pada masa yang akan datang upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dan berkesinambungan.

Kemiskinan merupakan masalah utama di negara kita dimana kondisi miskin tersebut terjadi dalam berbagai bidang yang ditandai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan menyampaikan aspirasi. Selain itu kondisi miskin dapat berakibat antara lain:

- a. Secara sosial ekonomi dapat menjadi beban masyarakat.
- b. Rendahnya kualitas dan produktifitas masyarakat.
- c. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat.
- d. Menurunnya ketertiban umum masyarakat dan ketentraman masyarakat.
- e. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Kemungkinan pada merosotnya mutu generasi (lost generations).

Dampak krisis ekonomi yang terjadi tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Untuk perkotaan lebih banyak dirasakan didaerah urbannya. Banyaknya masyarakat perkotaan yang kehilangan lapangan kerja, merupakan salah satu dampak nyata dari keberadaan krisis ekonomi tersebut.

Menyadari akan terjadinya gejala tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah operasional dalam bentuk revitalisasi dan restrukturisasi proyek-proyek pembangunan yang diarahkan untuk mengatasi jumlah pengangguran dan masyarakat

miskin, mengatasi ketidakberdayaan masyarakat yang telah jatuh miskin, termasuk didalamnya adalah apa yang terjadi di perkotaan..

Selama ini Program-program pengentasan kemiskinan telah banyak yang dikeluarkan pemerintah. Namun tidak sedikit yang hanya bersifat reaktif dan temporer, yang tidak memiliki keberlanjutan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut secara tuntas. Upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program antara lain Program IDT (inpres Desa Tertinggal), JPS (Jaring Pengaman Sosial), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), dan sebagainya. Berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah sebagian besar bersifat *top down* sehingga masyarakat miskin yang merupakan sasaran program kurang begitu berperan di dalam program-program yang ada.

Tahun 1993 misalnya pemerintah mengeluarkan Inpres no 5 tahun 1993 tentang Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan di desa tertinggal melalui pemberian bantuan modal usaha dan bantuan tenaga pendamping. Pada tahun 1996 pemerintah melanjutkan program dengan BP3DT atau Bantuan Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal dengan pola pelaksanaan langsung diserahkan kepada masyarakat melalui wadah LKMD. Demikian pula dengan program Jaring Pengaman Sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Program-program itu belum

menunjukkan keberhasilan yang memadai dalam arti bahwa secara menyeluruh program tersebut belum berdampak secara signifikan terhadap proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat lebih difungsikan sebagai subyek dalam seluruh proses kegiatan. Namun program P2KP merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan yang meletakkan keluarga miskin juga sebagai subyek dalam pelaksanaan program tersebut.

Selama ini upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah telah menjangkau berbagai pelosok tanah air. *Out-putnya*, secara kuantitatif menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini terlihat pada data statistik yang menunjukkan, ketika dimulainya pembangunan lima tahunan (PELITA) pada akhir 1960-an, kurang lebih 60% penduduk Indonesia berada dibawah garis kemiskinan, dan kemudian pada 1996-an menjadi sekitar 17,6 persen Tetapi, ketika badai krisis (ekonomi) pada 1997-an telah mengecilkan pencapaian prestasi pembangunan nasional pada umumnya dan penurunan angka kemiskinan pada khususnya. Krisis tersebut (sebagaimana banyak dimuat di berbagai media, baik media elektronik maupun media massa) menyebabkan melonjaknya angka kemiskinan menjadi 23,4 % yaitu pada puncak krisis tahun 1999, namun pada tahun 2006 tahun menjadi 17,75 %. (Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia)

Kejadian tersebut telah memberi pelajaran berharga dan sebagai penyadaran bagi para penyelenggara negara, bahwa kebijakan dalam

melakukan pembangunan nasional pada umumnya, dan program penanggulangan kemiskinan pada khususnya yang menempatkan warga miskin sebagai obyek pembangunan selama ini masih kurang dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat sehingga perlu dievaluasi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah perlu lebih melibatkan penduduk miskin sebagai subyek pembangunan, sehingga diharapkan penanggulangan kemiskinan nantinya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Kelemahan lain dari program yang bersifat top down adalah bahwa implementasi program juga sering salah sasaran, dan menciptakan ketergantungan masyarakat pada pusat ataupun bantuan pihak luar. Selain itu muncul dampak yang kurang menguntungkan, misalnya perubahan perilaku yang semakin jauh dari semangat kemandirian, lunturnya kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama, kuatnya rasa saling curiga, semakin kuatnya stereotipe dan skeptisme dan lunturnya sifat keikhlasan/kerelawanan, kejujuran, keadilan.

Program penanggulangan kemiskinan di masa lalu juga cenderung melihat kemiskinan dari aspek ekonomi dan hanya pada tataran gejala yang tampak dari luar, cenderung bersifat parsial, sektoral, *charity* dan tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan. Hal ini yang menjadi penyebab berbagai program penanggulangan kemiskinan mengalami kegagalan. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara menyeluruh sering tidak sesuai dengan kondisi dari masing-masing

daerah. Tentu saja hal itu menyebabkan implementasinya rentan dengan berbagai bentuk penyalahgunaan atau penyelewengan. Kondisi yang demikian terjadi di desa Purbayan, Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Salah satu program penanggulangan kemiskinan yang ada di Desa Purbayan diantaranya adalah Program BLT (bantuan Langsung Tunai) ternyata juga tidak bisa menanggulangi kemiskinan, walapun jumlah penduduk miskin di Desa Purbayan relatif kecil. Disamping itu Desa Purbayan bukan merupakan desa miskin sehingga program-program penanggulangan kemiskinan yang demikian kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Jumlah penduduk miskin di Desa Purbayan pada tahun 2008 hanya 181 jiwa keluarga yang termasuk pra sejahtera dan 483 jiwa keluarga sejahtera I atau secara keseluruhan hanya 14,69 % dari jumlah penduduk Desa Purbayan sebanyak 4518 jiwa (Sumber: Monografi Desa Purbayan, 2008). Disamping program tersebut juga dilaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang mengedepankan strategi pemberdayaan berbasis institusi lokal. Program ini tentu saja berbeda dengan program BLT. Program ini muncul sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan perkotaan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo merupakan program baru dan program yang mengedepankan strategi pemberdayaan institusi lokal tentu saja akan dimungkinkan munculnya berbagai persoalan dalam

pengimplementasiannya. Disamping itu mengingat program P2KP di Desa Purbayan merupakan program baru dan komponen kegiatan yang lebih mengutamakan pembangunan fisik sarana prasarana yaitu 70 % alokasi dana untuk pembangunan fisik, 20 % untuk bantuan ekonomis produktif dan 10 % untuk bantuan sosial, bagaimana program tersebut dalam implementasinya memberdayakan masyarakat melalui intitusi lokal yang dibentuk oleh warga masyarakat dalam penaggulangan kemiskinan.

Untuk itu maka penulis tertarik untuk mengetahui proses implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan perkotaan (P2KP) yang berbasis institusi lokal dalam pemberdayaan masyarakat

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam latar belakang masalah penelitian, maka masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Program Penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo .
2. Hambatan-hambatan apa yang ada dalam rangka implemetasi program penaggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui implementasi program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam rangka implementasi program penanggulangan kemiskinan perkotaan di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari sudut teori, penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah pengetahuan, atau setidaknya dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai acuan bagi upaya penelitian lain yang sejenis dan lebih mendalam pada masa mendatang.
2. Dari sudut praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan di desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.

A. Landasan Teori

1. Implementasi Kebijakan Publik

Sebelum menguraikan tentang implementasi kebijakan publik, terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*). Day (1992 : 2) mengartikan “ *public policy is whatever govermenst choose to do or not to do* “ (Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan).

Carl Fredirch dalam Budi Winarno(1991: 13) mengartikan kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Menurut Anderson dalam Budi Winarno (2002 : 18) kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi, yakni :

1. Kebijakan publik senantiasa berorientasi pada maksud atau tujuan tertentu dan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam system politik.
2. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah.

3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan yang diinginkan pemerintah.
4. Kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif

Dari pengertian dan implikasi kebijakan tersebut dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan privat yang dibuat oleh administrator negara dalam kerangka memecahkan masalah publik dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Kebijakan publik selalu berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang diinginkan (Wahab, 1991 : 13)

Dari semua uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah baik yang bersifat aktif maupun pasif, untuk mengatasi masalah publik.

Suatu kebijakan publik dibuat untuk dilaksanakan. Untuk itu jika sebuah kebijakan telah disyahkan, tidak ada manfaatnya apabila kebijakan itu tidak diimplementasikan. Apa artinya implementasi kebijakan? Dalam Kamus Wester, dirumuskan secara pendek bahwa *to implement* berarti *to provide the means for carrying out; effect to; to give practical*. (Wahab, 2002 : 64).
Sedang menurut Parson implementasi kebijakan adalah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut (Wayne Parson:2005 : 466).

Sementara Charles Jones (1984:13) merumuskan batasan implementasi sebagai “ *a process of getting additional resources so as to figure out what is to be done* “ Dalam perumusan ini implementasi merupakan proses untuk mendapatkan sumberdaya tambahan, sehingga dapat memperkirakan apa yang harus dikerjakan. Dari rumusan tersebut maka dalam implementasi memerlukan dua macam tindakan yang berurutan yaitu pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan; kedua melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan.

Mazmanian dan Sabatier (1983:20) memberikan rumusan tentang proses implementasi sebagai berikut :

“Implementation is the carrying out of basic policy decision usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executives orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problem(s) to be addressed stipulates the objective(s) to be pursued, and in a variety of ways “ structure” the implementation process”.

Berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya Mazmanian dan Sabatier memberikan gambaran langkah-langkah dalam melakukan intervensi kebijakan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) mengidentifikasi masalah yang harus diintervensi.
- 2) Menegaskan tujuan yang hendak dicapai , dan
- 3) Merancang struktur proses implementasi.

Dengan demikian untuk diimplementasikan maka program harus disusun dengan jelas.

Sedangkan Van Meter dan Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (dalam Wahab, 2002, 66)

Dari beberapa pengertian implementasi tersebut di atas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

- (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan,
- (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan
- (3) adanya hasil kegiatan (out come)

Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang amat penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Bahkan lebih penting dari proses perumusan kebijakan (Udoji dalam Wahab 2002 :66). Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variable atau faktor, dan masing- masing variable atau faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Beberapa ahli mengemukakan beberapa model implementasi yang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dalam menentukan variable-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk itu maka dalam bagian berikut ini akan dikemukakan berbagai model dalam implementasi kebijakan.

2. Model-Model Implementasi

Dalam melakukan implementasi dikenal beberapa model, baik yang bersifat *top down*, *bottom up* atau sintesis diantaranya keduanya. Dalam penelitian ini peneliti lebih memilih model *top down*, mengingat kebijakan tentang P2KP lebih dinilai dari perspektif pelaksanaan kebijakannya. Adapun model-model tersebut antara lain :

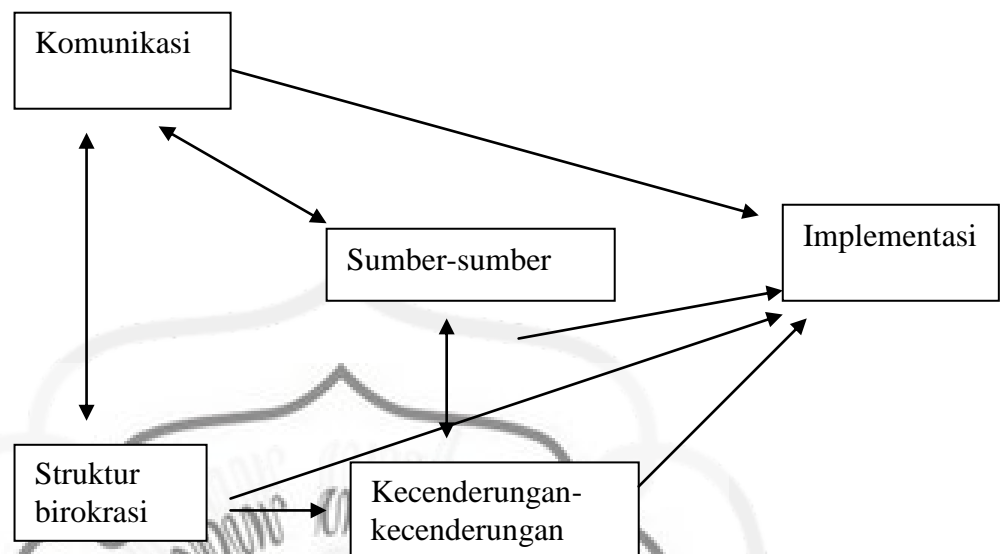
a. Model George C Edward III

Menurut Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni :

- (1) komunikasi,
- (2) sumberdaya,
- (3) disposisi,
- (4) struktur birokrasi.

Keempat variable tersebut saling berhubungan satu sama lain (Subarsono 2006 :90). Model tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar I : Model implementasi dari Edwards III



(Sumber : Subarsono, 2006:91)

Variabel yang pertama adalah komunikasi. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada personil yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementator akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas yaitu :

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah

pengertian (*miscommunication*), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya. Menurut George C Edwards III indikator sumber daya terdiri dari beberapa unsur yaitu :

- a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadahi ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementator saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan

keahlian dan kemampuan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan di saat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus berdifat normal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementator dimana publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melaihal efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang

diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut George C Edward II adalah disposisi atau sikap pelaksana kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang akan dilakukan dan harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal yang harus dicermati pada variable disposisi adalah :

- a. Pengangkatan birokrat ; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pelaksana kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

Variabel keempat, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan publik yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang atau banyak pihak yang terkait, bila struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Untuk mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, perlu melaksanakan *Standart Operating Procedures (SOPs)* dan *Fragmentasi*. *SOPs* adalah suatu instruksi sederhana, untuk menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang paling efektif dalam rangka memenuhi

persyaratan operasional. Dengan *SOPs* tersebut pegawai/ pelaksana kebijakan melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan pegawai di antara beberapa unit kerja.

b. Model Van Meter dan Van Horn (1975)

Implementasi kebijakan menurut Van Horn dan Van Meter (1975:447) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam berbagai variabel. Dalam pelaksanaannya diperlukan standar atau aturan baku untuk melihat kinerja dan keberhasilan implementasinya. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Adapun variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, ada enam variable yaitu :

a. Standar dan sasaran kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana

kebijakan. Ketika ukuran kebijakan dan sasaran kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka memang agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga pada titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumberdaya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi kebijakan. Dalam tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berkompetensi sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.

Disamping sumberdaya manusia, sumberdaya lain perlu diperhitungkan ialah sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas sumberdaya manusia, sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu itu tidak tersedia yang memadai, maka kinerja implementasi kebijakan sangat sulit untuk diharapkan.

c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas.

Implementasi kebijakan publik akan berjalan efektif bila standar dan sasaran kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Dengan demikian maka kejelasan standar dan sasaran kebijakan sangat penting untuk

dipahami oleh para pelaksana dengan perlunya ketepatan komunikasi antar organisasi, disamping itu adanya penguatan aktivitas. Komunikasi antar organisasi merupakan mekanisme ampuh dalam implementasi kebijakan. Dengan ketepatan komunikasi maka pihak-pihak yang terlibat dapat memahami kejelasan standar dan sasaran kebijakan sehingga akan mengeliminir kesalahan-kesalahan yang mungkin akan timbul.

d. Karakteristik agen pelaksana.

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana meliputi struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan atau program.

e. Sikap/ kecenderungan (disposisi) para pelaksana.

Sikap/ kecenderungan para pelaksana ini mencakup tiga hal yang penting yaitu :

- 1) Respons pelaksana terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
- 2) Kognisi, yakni pemahaman pelaksana terhadap kebijakan;
- 3) Intensitas sikap pelaksana, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana.

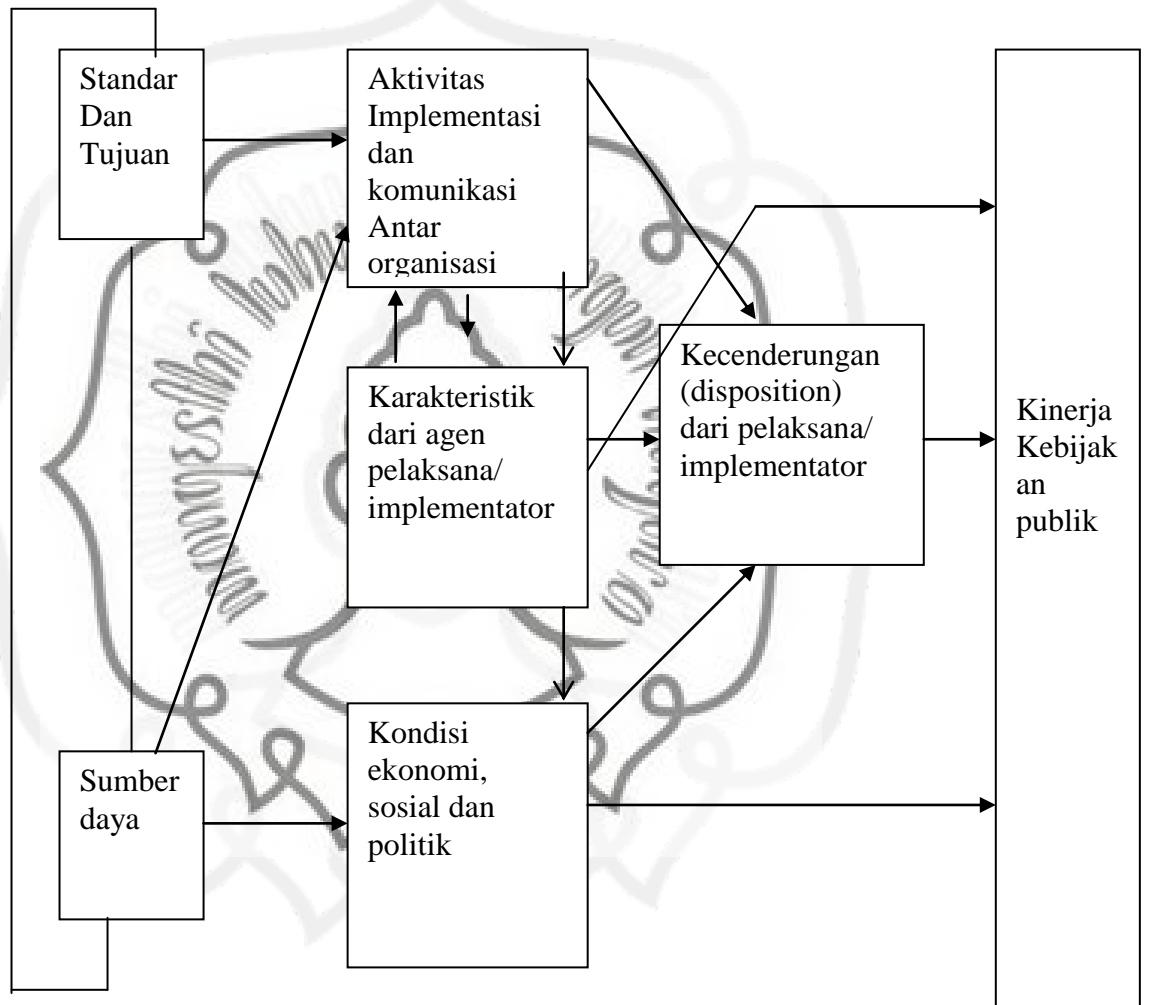
f. Kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan

dukungan terhadap implementasi; dan bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar : II. Model Implementasi Van Meter dan Van Horn



c. Model. Grindel (1980)

Menurut Merilee.S. Grindel (1980) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan (*Content Policy*) mencakup

- (1) sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
- (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group.
- (3) sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- (4) apakah letak sebuah program sudah tepat.
- (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan
- (6) apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

Sedangkan variable lingkungan kebijakan (*Contex Policy*) mencakup:

- (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- (2) karakteristik institusi dan penguasa yang sedang berkuasa;
- (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

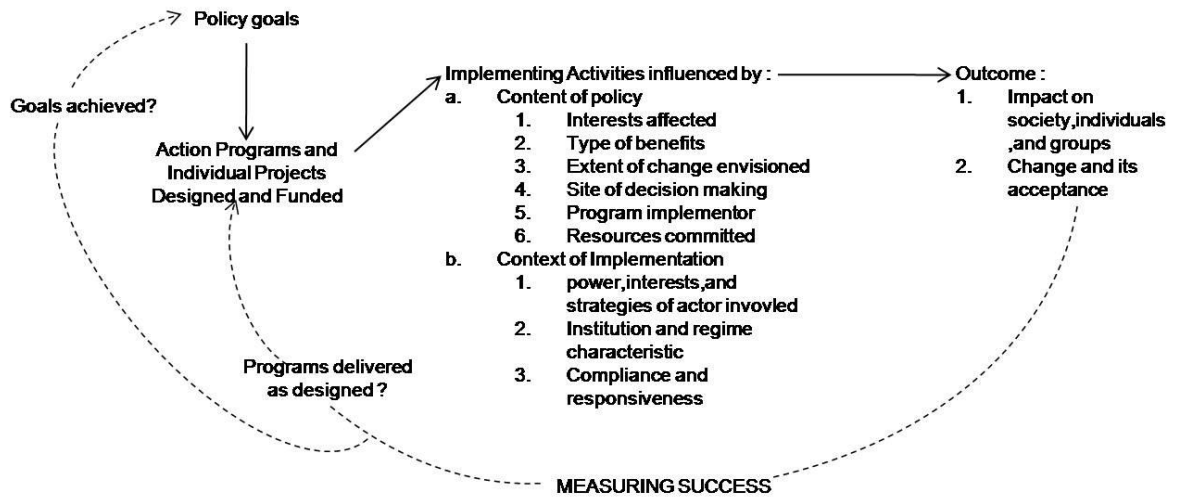
(Subarsono 2006:93)

Secara sederhana model ini dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar III : Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S .

Grindle

Implementation as a Political and Administrative Process



d. Model Mazmanian dan Sabatier. (Subarsono 2006 : 93-99)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yakni;

- (1) karakteristik dari masalah;
- (2) karakteristik kebijakan dan
- (3) variable lingkungan.

Yang dimaksud karakteristik masalah adalah :

- Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
- Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
- Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
- Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Yang dimaksud karakteristik kebijakan adalah

- Kejelasan isi kebijakan

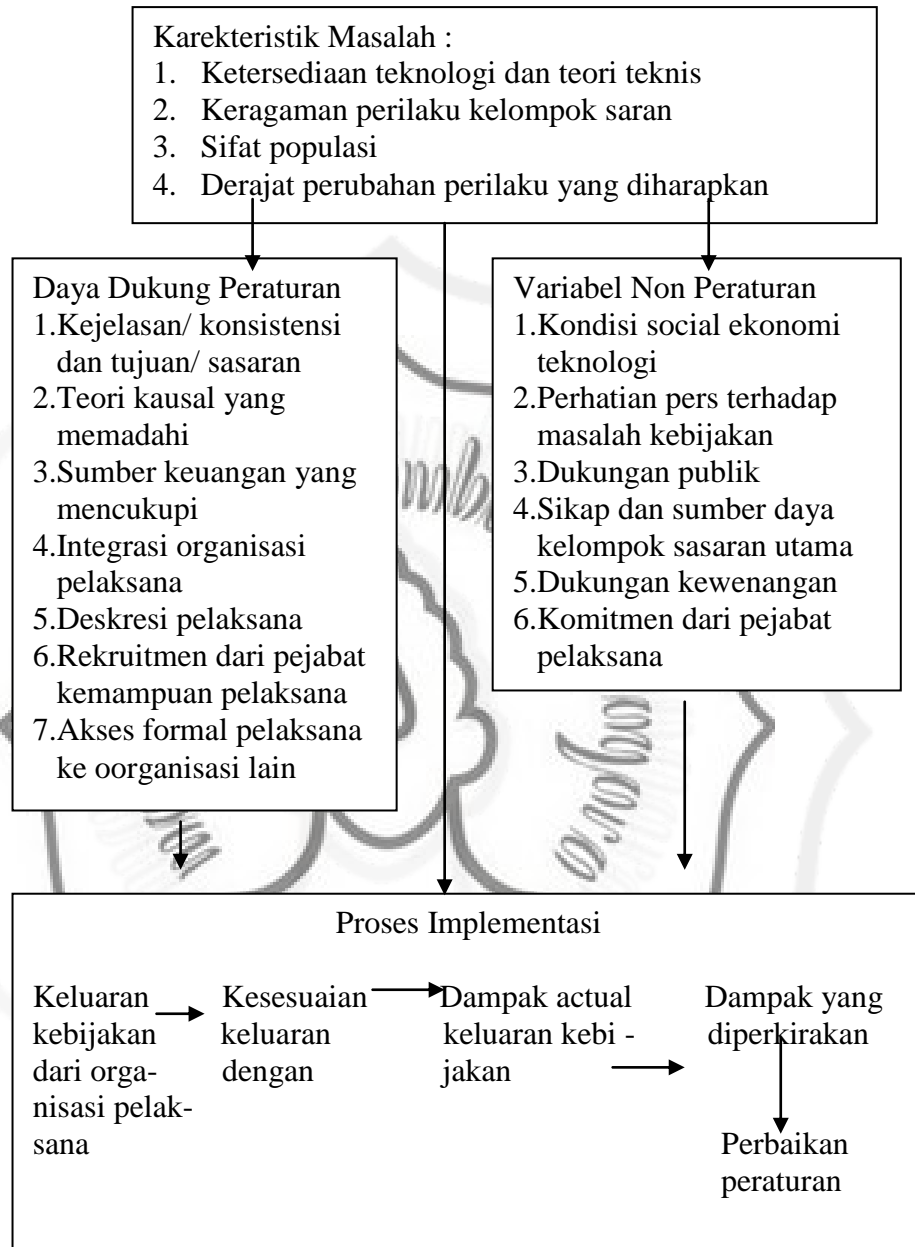
- Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
- Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut.
- Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan berbagai institusi pelaksana.
- Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi.

Yang dimaksud lingkungan kebijakan adalah :

- Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
- Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
- Sikap dari kelompok pemilih.
- Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat implementor

Secara sederhana model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar IV: Model Implementasi Sabatier dan Mazmanian



Sumber : Samodra Wibawa (1994 : 26)

Dari beberapa model implementasi kebijakan tersebut selanjutnya akan peneliti analisis untuk dijadikan kerangka teori dalam penelitian ini. Model Edwards III terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi , (2) sumber

daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Model ini menurut penulis kurang menyentuh fokus penelitian karena pada program P2KP aspek manfaat yang diperoleh dari adanya program ini menjadi sub faktor dari variable isi kebijakan program P2KP. Meskipun salah satu variable yang dikemukakan pada model ini juga dikemukakan pula oleh Grindle, namun dirasa masih kurang lengkap dan menyentuh fokus penelitian.

Model yang dikemukakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier berpendapat bahwa peran yang penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi dengan pendekatan variable-variabel (1) mudah tidaknya masalah akan dilaksanakan, (2) kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi, (3) variable di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi, dan (4) tahapan dalam proses implementasi kebijakan. Menurut penulis model ini kurang tepat bila hal ini digunakan untuk melihat proses implementasi program P2KP karena terlalu luas dan tidak menyentuh fokus penelitian terhadap program P2KP.

Sedangkan pendekatan model Donald Van Meter dan Carl Van Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Pada model ini menurut penulis dirasa kurang dapat mengakomodir variabel-variabel yang dapat digunakan untuk melihat proses implementasi kebijakan terutama pada aspek kepentingan yang didukung, manfaat program, serta derajat perubahan. Sedangkan pada model Grindle; menurut peneliti, jika

dibandingkan dengan model-model top-down di atas lebih dapat menyentuh dan menganalisis implementasi program P2KP dari aspek isi kebijakan dan konteks kebijakan. Model-model yang penulis kemukakan di atas merupakan model-model implementasi top-down.

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan salah satu model implementasi top down tersebut, namun penulis menggabungkan beberapa faktor yang mempengaruhi dari tiap-tiap model yang sinergi.

Sementara itu tentang studi implementasi ini beberapa pakar juga menyatakan hal yang berbeda. Menurut Anderson (1979, 68), ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam studi implementasi kebijakan yaitu :

- 1) siapa yang mengimplementasikan,
- 2) hakekat dari proses administrasi,
- 3) kepatuhan dan
- 4) dampak dari pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu menurut Ripley & Franklin(1986,54) ada dua hal yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian implementasi, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *What's happening ?* (Apa yang terjadi). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk "*what's happening*" mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya.

Disamping itu dalam rangka mengungkap *what's happening* tersebut, pelaksanaan studi implementasi juga dapat dilakukan dengan

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. Dengan demikian guna kepentingan implementasi maka dapat dilakukan dengan melakukan deskripsi atas proses implementasi yang dilakukan. Ini bisa dilakukan dengan melihat aspek kepatuhan pada standard aturan serta dengan melihat faktor penentu keberhasilan atau kegagalan proses implementasi itu sendiri.

3. Program-program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia.

Ada beberapa strategi pembangunan yang telah dilakukan dengan maksud mengurangi tingkat kemiskinan, meskipun kebijakan ini dilakukan tidak secara langsung memerangi penyebab kemiskinan yang paling mendasar itu sendiri. (Tjokrowinoto, Moeljarto, 1993). *Pertama*, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan cara menyelenggarakan berbagai proyek Inpres karena proyek ini akan mendatangkan pentransferan sumber-sumber dana pembangunan dari pusat ke daerah. *Kedua*, mempermudah lapisan sosial miskin untuk memperoleh akses dalam berbagai pelayanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, air bersih, sanitasi, dan lain-lain. *Ketiga*, penyediaan fasilitas-fasilitas kredit untuk masyarakat lapis bawah seperti Kupedes, KURK, BKK, KCK dan lain-lainya. *Keempat*, pembangunan infrastruktur ekonomi pedesaan, khususnya pembangunan pertanian. *Kelima*, pengembangan kelembagaan, seperti Program Pengembangan Wilayah, Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT), Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan lain-lain.

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan salah satu strategi pembangunan yang penekanannya pada pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui fasilitas kredit, pelayanan sosial dan pembangunan infrastruktur di pedesaan seperti perbaikan irigasi.

a. Pemberdayaan

1) Pengertian

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Konsep pemberdayaan mulai tampak kepermukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga akhir abad 20 (Pranarka Moeljarto, 1996 : 44). Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan digunakan dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Perspektif pembangunan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan non materi melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Sebagai suatu strategi pembangunan, pemberdayaan didefinisikan sebagai kegiatan membantu klien untuk memperoleh daya guna mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan, terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan

daya yang dimiliki dengan mentransfer daya dari lingkungannya (payne, 1997 : 266) . Sementara itu Ife (1995, :182) memberikan batasan pemberdayaan sebagai upaya penyediaan kepada orang-orang atas sumber, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka menentukan masa depannya dan untuk berpartisipasi di dalam dan memengaruhi kehidupan komunitas mereka. Terkait dengan itu, Sutrisno (2000 : 185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan. Perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

2) Strategi Pemberdayaan

Ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yang dikemukakan oleh Mark G. Hanna dan Buddy Robinson yaitu :

a) Strategi tradisional, b) Strategi direct-action, c) Strategi transformatif. (Harry Hikmat 2001 : 19).

Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan.

Strategi direct-action membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang terjadi.

Strategi transformatif menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

Dilihat dari strategi tersebut maka program P2KP merupakan pola pemberdayaan masyarakat miskin dengan strategi direct-action, mengingat program P2KP mengupayakan semua pihak terlibat melalui institusi lokal yang dibentuk warga masyarakat dan sasaran perubahan lebih jelas dengan strategi P2KP yaitu :

- a) penyelenggaraan konsep tribina;
- b) pemberian dana hibah untuk pembangunan prasarana dasar lingkungan serta pinjaman dana bergulir untuk modal kerja kegiatan produktif;
- c) penyelenggaraan pelatihan ketrampilan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk dapat membuka peluang usaha baru;
- d) peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar inisiatif mereka dapat ditumbuhkan dan diwujudkan; dan
- e) pendampingan pada Kelompok Swadaya Masyarakat.

b. Kemiskinan

1) Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan, adalah konsep yang cair, tidak pasti, dan multidimensional. Oleh kerana itu, banyak terdapat terminology kemiskinan baik yang dikemukakan oleh pakar secara individu

maupun secara kelembagaan. Dalam pengertian konvensional, kemiskinan (hanya) dimaknai sebagai permasalahan pendapatan (income) individu, kelompok, komunitas, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan (Zikrullah, 2000 : 11). Hal ini setidaknya terlihat pada batasan yang dikemukakan UNDP (1997) dalam Cox (2004 : 9), bahwa seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya rendah. Itu sebabnya, berbagai upaya penanganan kemiskinan itu tidak menyelesaikan masalah dan cenderung gagal.

Untuk itu, menurut Max Neef dalam Zikrullah (2000 : 11), sekurang-kurangnya ada enam macam kemiskinan yang perlu dipahami oleh pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap penanganan kemiskinan, yaitu:

- a) kemiskinan subsistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruh, fasilitas air bersih mahal;
- b) kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk, (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah;
- c) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran akan hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan;
- d) kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan control atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas;

- e)_ kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antara kelompok sosial, terfragmentasi; dan
- f). kemiskinan kebebasan , stress, rasa tidak berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.

Selanjutnya, Narhetali mengutip hasil penelitian tentang kemiskinan yang dilakukan Yeater & Mc Laughlin dari Bank Dunia (2000) yang menyatakan, bahwa orang miskin mempunyai penekanan yang berbeda dari pembuat kebijakan tentang hal-hal yang dipersepsi sebagai dimensi kemiskinan. Selain tingkat pendapatan, konsumsi, pendidikan dan kesehatan, kaum miskin juga menekankan faktor psikologis seperti kepercayaan diri, ketidakberdayaan (poserlesness) serta pengucilan fisik dan sosial sebagai sumber kemiskinan. Dengan demikian secara jelas terlihat bahwa bagi orang, kelompok, komunitas, masyarakat miskin, ternyata peningkatan pendapatan bukanlah satu-satunya hal yang amat penting. Tetapi, perlakuan humanis penuh harga diri, self-respect juga merupakan sesuatu yang amat bernilai (Kompas, 5 Mei.2000)

Meskipun banyak terminologi mengenai kemiskinan, tetapi secara umum dapat dinyatakan bahwa istilah kemiskinan selalu menunjuk pada sebuah kondisi yang serba kekurangan. Kondisi serba kekurangan tersebut dapat diukur secara obyektif, dirasakan secara subyektif, atau secara relative. Didasarkan pada perbandingan

dengan orang lain, sehingga melahirkan pandangan obyektif, subyektif, dan relative tentang kemiskinan.

2) Dimensi-Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan bukan saja berhubungan dengan persoalan ekonomi tetapi bersifat multi dimensional karena dalam kenyataannya kemiskinan juga berhubungan dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik). Karena sifat multi dimensional tersebut maka kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan kesejahteraan sosial.

Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut menurut Heru Nugroho dalam bukunya M. Amien Rais (1995 : 31) yaitu :

Pertama, yang paling jelas bahwa kemiskinan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan lain-lain. Dimensi ini dapat diukur dalam rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah.

Kedua , kemiskinan berdimensi sosial budaya. Ukuran kuantitatif kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini, sehingga ukuran sangat bersifat kualitatif.

Ketiga, kemiskinan berdimensi struktural atau politik. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki akses untuk terlibat dalam proses politik, sehingga menduduki struktur sosial yang paling bawah.

Dari pengertian dan dimensi-dimensi kemiskinan tersebut maka penulis dalam penelitian ini lebih menekankan pada kemiskinan yang berdimensi ekonomi karena kenyataan bahwa pada umumnya yang mudah diukur dan dapat dilihat adalah persoalan kebutuhan dasar. Kemiskinan berdimensi sosial budaya lebih cenderung merupakan akibat kemiskinan berdimensi ekonomi. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup.

4. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Terry (1991:64) mengemukakan bahwa “ Program merupakan jenis rencana yang komprehensif dihimpun oleh program ke dalam suatu bentuk gabungan rencana untuk masa yang akan datang berasal dari berbagai sumber di dalam sebuah perusahaan “ Menurut Sutarto (1995 :12) , mengemukakan bahwa program adalah perumusan yang memuat gambaran pekerjaan –pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk mengenai cara-cara pelaksanaannya.”

Dengan demikian , program pada dasarnya merupakan suatu perumusan rencana yang memuat gambaran-gambaran pekerjaan yang akan datang serta cara pelaksanaannya dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam

penanggulangan kemiskinan melalui konsep pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat sehingga dapat terbangun gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal. (Buku Pedoman Umum P2KP Edisi Oktober 2005)

1. Tujuan Program Penganggulangan Kemiskinan Perkotaan

Adapun tujuan program P2KP adalah :

- a. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representative, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, mampu memperkuat aspirasi/ suara masyarakat miskin, mampu dalam proses pengambilan keputusan lokal, dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di wilayahnya.
- b. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal), termasuk membangun kerjasama dan kemitraan sinergi ke berbagai (pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap lembaga masyarakat (BKM)
- c. Mengedepankan peran Pemerintah Kota/ Kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, baik melalui pengokohan peran dan fungsi Komite Penanggulangan

Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun melalui penguatan kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.

2. Strategi Program P2KP

Strategi program P2KP adalah :

- a. Mendorong tumbuh kembangnya prakarsa, partisipasi masyarakat serta transparasi.
- b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan yang berakar pada masyarakat khususnya dalam mengelola akses masyarakat miskin ke sumberdaya kunci.
- c. Menjalin sinergi penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan masyarakat melalui kemitraan antar pelaku pembangunan.
- d. Mendorong tumbuhnya kepedulian berbagai pihak sebagai pengendalian sosial terhadap keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.
- e. Membantu dana berupa bantuan langsung pada masyarakat (BLM) yang penggunaannya atas dasar usul warga melalui rembug warga.

3. Proses Pelaksanaan Program P2KP

Proses pelaksanaan program P2KP melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan meliputi kegiatan-kegiatan yaitu

- 1) Kegiatan sosialisasi awal dan loby-loby kelompok strategis : bentuk kegiatan menyampaikan pesan kepada para pihak dengan cara membangun opini mengenai latarbelakang, tujuan,

visi, misi, strategi, langkah-langkah atau tahapan, hasil yang diharapkan serta keluaran untuk membangun pemahaman, keyakinan dan kepedulian. Pada tahap ini seluruh stakeholders P2KP di tingkat kelurahan/ desa perlu memahami substansi dan makna dari serangkaian kegiatan P2KP, baik di tingkat masyarakat maupun tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok peduli lainnya.

- 2) Kegiatan rembug kesiapan masyarakat: adalah serangkaian rembug/ rapat warga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perangkat kelurahan/ desa bekerjasama dengan Tim Fasilitator mulai di tingkat RT atau RW sampai di tingkat kelurahan/ desa dengan mengundang semua warga kelurahan secara terbuka.
- 3) Kegiatan refleksi kemiskinan; adalah kegiatan masyarakat melalui diskusi kelompok (FGD) dan rembug desa untuk memahami kemiskinan di wilayahnya.
- 4) Kegiatan pemetaan swadaya adalah sekumpulan kegiatan dimana masyarakat belajar mengidentifikasi permasalahan, potensi dan kebutuhan bersama secara kritis berdasarkan pada kekayaan informasi lokal.
- 5) Kegiatan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan pemilihan anggota BKM

BKM adalah merupakan dewan atau majelis kolektif masyarakat warga tingkat kelurahan yang dibangun secara sadar oleh warga

untuk mengatasi persoalan yang dihadapi bersama, menggalang potensi, khususnya masalah kemiskinan yang mengedepankan nilai-nilai luhur (moralitas) dan berupaya untuk bersinergi dan membangun saling percaya diantara masyarakat sendiri maupun dengan pihak luar, dan mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan, termasuk kerjasama dengan pihak luar dengan memposisikan diri di luar lembaga pemerintah, agama, keluarga, militer serta usaha

6) Tahap penyusunan program jangka menengah penanggulangan kemiskinan.

Penyusunan program merupakan kegiatan awal BKM bersama relawan-relawan, masyarakat serta pemerintah kelurahan dan kelompok peduli setempat, untuk merencanakan langkah-langkah dalam bentuk program jangka menengah dan rencana tahunan penanggulangan kemiskinan.

7) Membangun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

KSM yaitu kumpulan orang yang menghimpun diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga dalam kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

b. Tahap Pelaksanaan yaitu meliputi kegiatan pembelajaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tridaya

BLM adalah dana stimulan dari pemerintah yang dimaksudkan sebagai media pembelajaran masyarakat untuk terus membangun kapital sosial dan menumbuhkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal sehingga akan mampu menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan/ pemukiman mereka.

- c. Tahap Pengendalian yaitu meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- d. Tahap Pelestarian yaitu kegiatan yang berupa kelanjutan yang dilakukan oleh warga masyarakat miskin terhadap program penanggulangan kemiskinan melalui KSM.

5. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan yaitu penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat melalui institusi lokal. Dalam melakukan penelitian implementasi ini peneliti menggunakan konsep yang dikembangkan Ripley & Franklin (1986) dimana untuk melakukan penelitian implementasi ada dua aspek yang harus dilihat yaitu bagaimana “kepatuhan” implementator pada aturan dan “apa yang terjadi dan berhasil dicapai” selama proses implementasi”

Untuk melihat kepatuhan maka yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sejauhmana aturan pelaksanaan ditaati oleh para pelaksana. Sedangkan untuk melihat apa yang terjadi maka dalam penelitian ini akan dilihat dan diidentifikasi berbagai hambatan yang timbul dalam

proses pelaksanaan, dimana peneliti memilih sejumlah indikator yang mempengaruhi yang dikembangkan oleh sejumlah pakar yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun indikator yang digunakan adalah :

1. Ada tidaknya standar pelaksanaan (diadopsi dari Van Meter dan Van Horn)
2. Sumberdaya (diadopsi dari Mazmanian, Grindle, Van Meter & Van Horn)
3. Komunikasi (diadopsi dari George Edward III, Van Meter & Van Horn, Mazmanian, Gindle)
4. Sikap pelaksana (diadopsi dari George Edward II, Van Meter & Van Horne dan Mazmanian). Selanjutnya berdasarkan hambatan yang teridentifikasi dapat diketahui berbagai upaya atau sejumlah strategi dalam mengatasi demi terciptanya efektifitas implementasinya.

Implementasi Program P2KP terdiri dari beberapa tahapan meliputi :

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pelaksanaan
3. Tahap pengendalian
4. Tahap pelestarian

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengangkat mengenai masalah implementasi program penanggulangan kemiskinan memang sudah banyak dilakukan para peneliti terdahulu, tetapi yang meneliti masalah implementasi program

penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat miskin melalui intitusi lokal masih jarang ditemui.

Dalam penelitian ini akan diangkat hasil-hasil penelitian terdahulu yang mengangkat topik mirip dengan penelitian ini yaitu :

- (1) Penelitian dengan judul Implementasi Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Jumapolo yang ditulis oleh Heru Joko Sulistyono (2005) dalam penelitian ini secara umum dapat disimpulkan bahwa dari aspek kepatuhan Pelaksanaan Proram PPK di Kecamatan Jumapolo telah sesuai dengan aturan pelaksanaannya, namun masih banyak ditemui berbagai hambatan yang berkaitan dengan beberapa hal yaitu : Standard program, sumberdaya, komunikasi, sikap pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Penelitian dengan judul Studi Efektifitas Pelaksanaan Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan- Rehabilitasi dan Rekontruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (P2KP-REKOMPAK) di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, (2007) dalam penelitian ini dikaji dan ditelaah aspek kelembagaan KSMP, aspek pembangunan perumahan dan P2KP –REKOMPAK, aspek peserta penerima BLM perumahan melalui P2KP-REKOMPAK dan system adminsittrasi keuangan BLM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :

- a. Aspek kelembagaan tujuan KSMP secara keseluruhan sudah terpenuhi, namun peran BKM masih dominant.
- b. Aspek pembangunan rumah secara fisik tercapai namun dari sisi waktu tidak tercapai.
- c. Aspek

administrasi keuangan cukup tertib. d. Aspek sasaran tidak sesuai dengan kriteria.

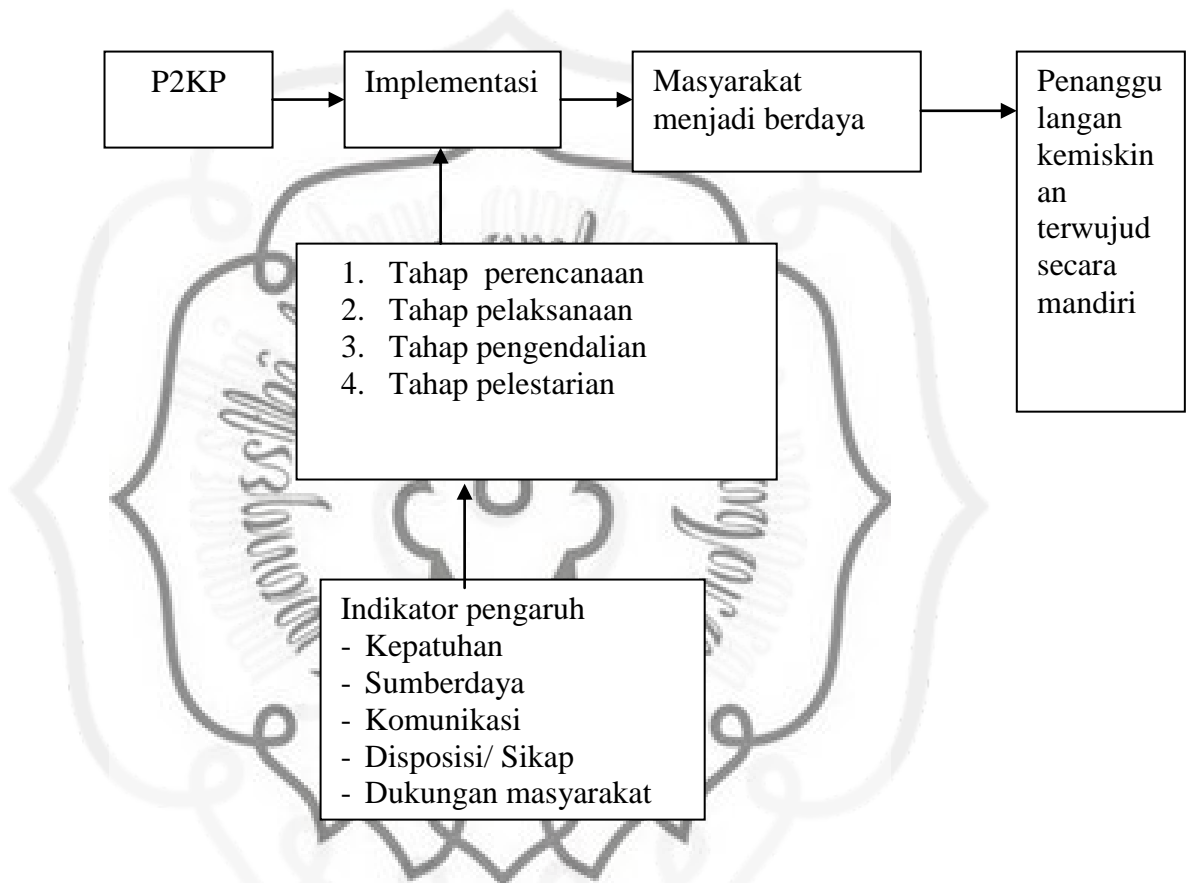
Dari kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang penanggulangan kemiskinan yang sejenis ternyata aspek pembahasan berbeda-beda, demikian pula penelitian yang dilakukan penulis sejenis dengan penelitian yang terdahulu, namun fokus pembahasannya berbeda, penelitian penulis lebih menyoroti bagaimana implementasinya program P2KP di Desa Purbayan dapat memberdayakan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan meneliti bagaimanamana proses implementasinya dan faktor-faktor yang mempengaruhi dan hambatan-hambatannya dengan mengambil dari berbagai model implementasi.

B. Kerangka Berfikir

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui institusi lokal untuk penanggulangan kemiskinan maka telah terwujud program P2KP. Dengan telah adanya program P2KP maka diharapkan masyarakat berdaya secara mandiri untuk menanggulangi kemiskinan di daerahnya dengan mewujudkan lingkungan fisik yang mendukung kelancaran perekonomian dan tumbuhnya usaha ekonomis produktif yang dilakukan oleh warga miskin itu sendiri. Dalam melihat implementasi P2KP ini maka peneliti menggunakan konsep Ripley dan Franklin (1986) dimana akan melihat bagaimana kepatuhan pelaksana atas aturan pelaksanaan yang ada. Hal ini dilakukan dengan menjelaskan gambaran tahapan-tahapan proses implementasi. Disamping itu dalam rangka menjawab pertanyaan apa yang terjadi peneliti melakukannya dengan mencoba

mengidentifikasi factor penghambat dna pendukung yang ada dalam proses implementasi tersebut, dengan memilih beberapa hal yang diambil dari model-model top down yang telah diuraikan dalam lanasan teori.

Gambar V: Kerangka berfikir kajian implementasi program P2KP



Dengan demikian berdasarkan kerangka berfikir tersebut, secara umum dapat dikatakan bahwa Implementasi Program P2KP akan berlangsung baik manakala standar pelaksanaan/ aturan dilaksanakan atau dipatuhi. Semua tahap-tahap dilalui dengan baik. Disamping itu keberhasilan mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul berkaitan dengan standar pelaksanaan, komunikasi, sumberdaya dan sikap pelaksana dan kondisi sosial ekonomi

diharapkan dapat mengantisipasi strategi atau upaya yang akan dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan program tersebut.

C. Definisi Konsep dan Operasional

Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) adalah proses pencapaian tujuan program penanggulangan kemiskinan yang dapat diwujudkan dari serangkaian kegiatan pada Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi program P2KP digunakan beberapa indikator yaitu :

1. Tingkat Kepatuhan.

Dalam hal ini untuk memahami aspek kepatuhan dilakukan dengan

- a. Melihat ada tidaknya aturan pelaksanaan.
 - b. Komitmen pelaksana akan aturan pelaksanaan yang ada.
 - c. Kepatuhan pelaksana dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan.
2. Berbagai faktor yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan yaitu :
 - a. Sumberdaya : baik berupa dana maupun sumberdaya manusia
 - b. Komunikasi : baik komunikasi vertikal maupun horizontal
 - c. Sikap pelaksana: meliputi sikap terhadap program dan sasaran program
 - d. Kondisi sosial ekonomi.



BAB. III

MOTODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .

Jenis penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif. Ada beberapa pendapat tentang metode penelitian diantaranya yaitu :

“ Metode penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta –fakta yang tampak atau sebagaimana adanya “ (Surachmad, 1989 : 140)

Dalam hubungan dengan riset kualitatif yang memusatkan pada deskriptif, HP Sutopo (2002 : 35) mengemukakan bahwa data yang dikumpulkan berwujud kata-kata dan dalam kalimat atau gambar yang mempunyai arti lebih dari sekedar angka atau jumlah, berisi catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data

Sedangkan berdasarkan tujuannya penelitian deskriptif bermaksud untuk memberikan uraian mengenai sesuatu gejala sosial yang diteliti. Peneliti mendeskriptifkan suatu gejala berdasarkan indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang dia teliti. (Yulius Slamet 2006 : 7)

Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J. Moloeng (2000 : 4) mengartikan penelitian deskriptif sebagai penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

Dari pengertian-pengertian di atas maka penelitian ini bersifat mengemukakan fakta apa adanya baik fakta yang dikemukakan secara tertulis maupun lisan. Dengan demikian sesuai dengan obyek penelitian maka penelitian ini berusaha menggali untuk menemukan fakta dan memahami permasalahan yang dihadapi pada proses implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), sehingga akan diketahui bagaimana proses implementasi kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian adalah Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat penelitian ini dilakukan, di lokasi ini program P2KP merupakan program baru sehingga dimungkinkan terdapat beberapa kendala atau permasalahan dalam implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.

C. Sumber Data

Data atau informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan dikaji dalam penelitian ini sebagian besar data kualitatif. Informasi akan digali dari

berbagai sumber data. Adapun jenis sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer yaitu informan atau nara sumber yang terdiri dari:

- a. Fasilitator Kelurahan
- b. Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)
- c. Pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
- d. Pengurus RT
- e. Warga masyarakat

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data untuk pelengkap informasi. Sumber data ini berupa arsip dan dokumen resmi mengenai P2KP, seperti dokumen rapat, laporan kegiatan dan sebagainya.

Adapun penentuan informan tersebut dilakukan melalui teknik *Purposive Sampling*. Dalam hal ini peneliti mengambil informan dari pihak yang dianggap mengetahui tentang fenomena yang diteliti.

Menurut Arikunto (1998:128), sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu :

1. Pengambilan sampel harus didasarkan atas cirri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang mempunyai cirri-ciri pokok populasi.

2. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar mempunyai subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subyek)
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Disamping itu guna melengkapi informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini juga dimungkinkan menggunakan teknik *snow ball sampling*. Menurut Sutopo (2002:57) Teknik ini digunakan bilamana peneliti ingin mengumpulkan data, tetapi peneliti tidak tahu siapa yang tepat untuk dipilih karena tidak mengetahui kondisi dan struktur warga masyarakat di lokasi, sehingga tidak bisa merencanakan pengumpulan data secara pasti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Teknik pengumpulan data untuk informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan informan atau nara sumber yang dianggap berkompeten terhadap sesuatu permasalahan. Dengan demikian dimungkinkan wawancara dilakukan secara berulang untuk melengkapi data yang telah diperoleh sebelumnya. Wawancara ini dilakukan kepada, Konsultan Manajemen Wilayah,

Fasilitator, Pengurus BKM, Pengurus KSM, Pengurus RT dan juga beberapa warga masyarakat.

2. Pengamatan

Teknik pengumpulan data melalui pengamatan di lokasi yang diteliti secara langsung. Adapun pengamatan yang dilakukan berhubungan hasil-hasil kegiatan serta dengan proses kegiatan implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, yaitu dengan melihat kegiatan-kegiatan dalam masyarakat, sikap pelaksana, sumber daya, partisipasi masyarakat, dan komunikasi.

3. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan data dengan jalan meneliti dokumen yang ada meliputi catatan-catatan harian, peraturan-peraturan, notulen rapat, laporan kegiatan dan sebagainya.

E. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, data akan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian secara deskriptif ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan data penelitian sesuai dengan variable-variabel yang akan diteliti, tanpa melakukan pengujian hipotesa. Adapun teknik yang digunakan adalah teknik interaktif dari Miles & Huberman (1988). Dalam model analisis data terdiri atas tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan

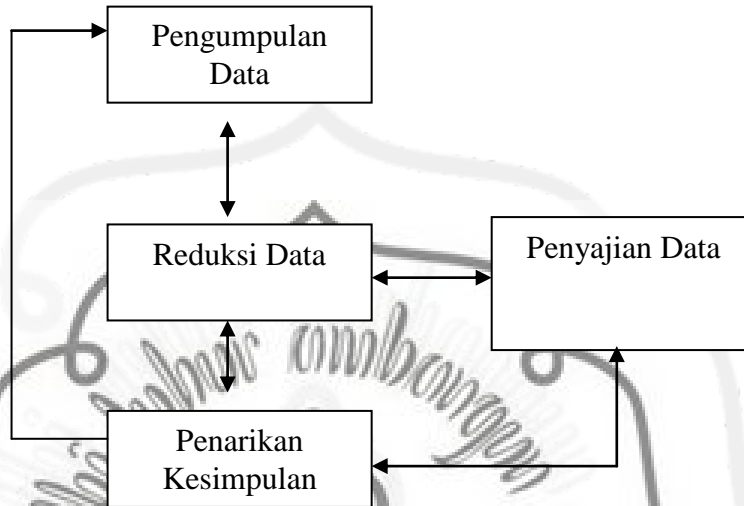
penarikan kesimpulan. Ketiga komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaktif dengan proses pengumpulan data yang menggunakan proses siklus.

Adapun penjelasan dari kriteria tersebut sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, merupakan informasi baik dari data primer maupun data sekunder.
2. Reduksi data, merupakan proses seleksi pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada dalam *field note* (catatan di lapangan)
3. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian argumentasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk tabel naratif.
4. Penarikan kesimpulan, merupakan suatu usaha menarik konklusi dari hal-hal yang ditemui dalam reduksi maupun penyajian data

Secara sederhana proses analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar VI : Teknik Analisa Interaktif.



Selanjutnya untuk mengupayakan validitas data, dilakukan triangulasi data, dengan cara membandingkan data yang sama dari sumber yang berbeda, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi.

Menurut Patton (Moleong, 2002: 178) triangulasi dibagi menjadi empat yaitu :

1. Triangulasi sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Triangulasi metode, yaitu dengan menggunakan dua strategi; a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian

beberapa teknik pengumpulan data; b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi peneliti, yaitu dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan.
4. Triangulasi teori, yaitu melakukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisis dengan menggunakan beberapa perspektif yang berbeda.

Cara yang ditempuh untuk pengujian validitas data dalam penelitian ini dengan triangulasi sumber, menurut Patton (Maleong, 2002: 78) adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang lain di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang berlainan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berlainan.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan point 4 dan 5 yaitu membandingkan pendapat dan pandangan dari berbagai orang atau informan

yang memiliki latar belakang berlainan dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berlainan. Langkah ini penulis tempuh untuk menyesuaikan dengan penelitian, dan keterbatasan waktu, biaya serta kemampuan penulis sehingga tidak semua cara dapat dilakukan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

a. Keadan Geografis

Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu desa terletak di bagian pinggiran utara .

Adapun batas-batas desa Purbayan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Makamhaji
- Sebelah Timur : Desa Gentan
- Sebelah Selatan : Desa Waru
- Sebelah Barat : Desa Mayang

Desa Purbayan mempunyai wilayah seluas 11 Ha (110.000 km²) pada tahun 2009 jumlah penduduk tercatat sebanyak 4659 jiwa. Dengan demikian kepadatan penduduk Desa Purbayan rata-rata jiwa setiap kilom eter persegi.

Secara administrasi, Desa Purbayan terbagi menjadi 11 RW (Rukun Warga) dan 36 RT (Rukun Tetangga) Pembagian wilayah RW dan RT dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1

Pembagian Wilayah RW dan RT Desa Purbayan Kecamatan Baki

No.	Wilayah RW	Jumlah RT
1.	I	6
2.	II	3
3.	III	2
4.	IV	3
5.	V	3
6.	VI	3
7.	VII	3
8.	VIII	4
9.	IX	6
10.	X	6
11.	XI	2

Sumber : Monografi desa Purbayan Th. 2009

b. Keadaan Demografi

Pada akhir tahun 2009 jumlah penduduk Desa Purbayan tercatat sebanyak jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2296 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2363 jiwa. Pembagian penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat seperti pada table 2 berikut ini :

Tabel 2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Desa Purbayan
Kecamatan Baki

Kelompok Umur	Jumlah (Orang)	Prosentase
0-4	509	10,92 %
5-9	386	8,28 %
10-14	455	9,76 %
15-19	621	13,32 %
20-24	262	5,62 %
25-29	266	5,7 %
30-34	341	7,31 %
35-39	346	7,42 %
40-44	325	6,97 %
45-49	442	9,48 %
50-54	371	7,96 %
55 ke atas	335	7,19 %
Jumlah	4659	100%

Sumber : Monografi Desa

1) Idiologi, Agama dan Sarana Tempat Ibadah

Warga masyarakat Desa Purbayan Kecamatan baki telah menghayati UUD 1945 , sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2 bahwa Indonesia . Komposisi pemeluk agama

masyarakat Desa Purbayan beragam namun demikian kerukunan umat beragama dapat terjalin dengan baik Pada tahun 2009 di Desa Purbayan terdapat 5 agama yang dipeluk oleh warga masyarakat yaitu sebagaimana pada table 3 berikut ini

Tabel 3

Banyaknya Pemeluk Agama Warga Masyarakat Desa Purbayan Kecamatan Baki Tahun 2009

No.	Agama	Jumlah (Orang)	Prosentase
1.	Islam	3916	84,05 %
2.	Kristen Katolik	109	2,33 %
3.	Kristen Protestan	59	1,26 %
4.	Budha	575	12,34 %
	Jumlah	4659	100 %

Sumber : Momografi Desa

Sarana tempat ibadah umat beragama Desa Purbayan berupa, masjid, musholla, vihara sebagaimana table 4 di bawah ini :

Tabel 4

Sarana Tempat Ibadah Desa Purbayan Kecamatan Baki

No.	Tempat Ibadah	Jumlah (Buah)
1.	Masjid	6
2.	Musholla	8
3.	Vihara	1

Sumber : Monografi Desa Purbayan

2) Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya warga masyarakat Desa Purbayan dapat dikatakan relatif dinamis. Dinamika masyarakat dari segi sosial budaya dapat dilihat dari adanya beberapa kelompok kesenian.

Kesenian sebagai salah satu budaya masyarakat, mempunyai nilai-nilai dalam menyalurkan kebutuhan hidup manusia baik jasmani maupun rohani.

Kelompok-kelompok kesenian yang ada di Desa Purbayan dapat dilihat dalam tabel 5

Tabel 5
Kelompok Kesenian Desa Purbayan Kecamatan Baki
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009

	Nama Kelompok	Jumlah
1.	Kesenian Rebana	1
2.	Kesenian Keroncong	3
3.	Kesenian Karawitan	1

3) Ekonomi

Upaya pemberdayaan warga Desa Purbayan Kecamatan Baki dilakukan secara terpadu dengan upaya pembangunan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara bertahap dengan dukungan sarana kegiatan ekonomi, sehingga

dapat menumbuh kembangkan ekonomi rakyat dengan berbagai macam usaha ekonomi produktif oleh warga. Kegiatan usaha ekonomi produktif saat ini yang berkembang di Desa Purbayan adalah usaha di bidang makanan

Pengusaha dan jenis usaha tersebut dapat dilihat pada table 6

Tabel 6
Jenis Usaha di Bidang Makanan dan Kerajinan
Desa Purbayan Kecamatan Baki Tahun 2009

No.	Jenis Usaha	Nama Pengusaha	Alamat
1.	Pengrajin emping	Handayani	Rt.02 Rw.01
2.	Pengrajin emping	Sajiyem	Rt. 01 Rw.01
3.	Pengrajin emping	Temi	Rt.01 Rw.01
4.	Pengrajin emping	Muji	Rt.02 Rw.05
5.	Pengrajin tempe	Mul Banjar	Rt.02 Rw. 02
6.	Pengrajin tempe	Gito Sireng	Rt.02 Rw.04
7.	Pengrajin tempe	Jiman	Rt.03 Rw.04

Sumber : Desa Purbayan tahun 2009

Dari sisi angkatan kerja, lapangan pekerjaan dan pengangguran, kondisi yang terjadi di Desa Purbayan adalah sebagai berikut :

a) Angkatan Kerja

Dalam tahun terakhir ini jumlah angkatan kerja (penduduk yang berumur 15 tahun ke atas baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja) jumlahnya mengalami kenaikan.

Pada tahun 2008 jumlah penduduk Desa Purbayan sebanyak 4518 jiwa dengan jumlah angkatan kerja 2354 orang atau 52,10 %

Sedangkan pada tahun 2009 jumlah penduduk 4659 jiwa dengan angkatan kerja 2603 jiwa atau 55,87 %. data tersebut menunjukkan bahwa kenaikan angkatan kerja di desa Purbayan dari tahun 2008 dan 2009 sebanyak 3,77 %

b) Lapangan Pekerjaan

Di Desa Purbayan sebagian besar mata pencahariannya adalah buruh tani, karyawan swasta, buruh bangunan dan PNS. Pada tahun 2009 sebanyak 35,87% penduduk mempunyai mata pencaharian karyawan swasta, pedagang, 2,83%, buruh tani 9,40%, buruh bangunan 24,36%, pengusaha, 3,41%, montir 0,69%. Sedangkan mata pencaharian penduduk lainnya adalah sebagai PNS/ 11,16 % , TNI/ Polri 0,69% dan lain-lain termasuk pekerja informal 6,83% ,

Data penduduk menurut mata pencaharian seperti yang terlihat pada tabel 7 di bawah ini

Tabel 7

Banyaknya Penduduk Menurut Mata Pencapaian

No.	Mata Pencapaian Penduduk	Tahun 2008		Tahun 2009	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1.	Pedagang	63	2,67 %	74	2,83 %
2.	Karyawan Swasta	868	36,87 %	935	35,87 %
3.	Petani	139	5,90 %	123	4,71 %
4.	Buruh Tani	362	15,37 %	245	9,40 %
5.	Buruh Bangunan	472	20,05 %	635	24,36 %
6.	PNS	288	12,23 %	291	11,16 %
7.	TNI/ POLRI	10	0,42 %	18	0,69 %
8.	Pengusaha	93	3,95 %	89	3,41 %
9.	Montir	16	0,67 %	18	0,69 %
10.	Lain-lain	43	1,82 %	178	6,83 %
	Jumlah	2354		2606	

Sumber : Monografi Desa Purbayan

Dilihat dari tabel tersebut jelas bahwa penduduk Desa Purbayan pada umum bekerja di sektor swasta.

4) Pendidikan Masyarakat

Salah satu sektor yang paling utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah sektor pendidikan. Desa Purbayan masih ada anggota masyarakat yang buta huruf walaupun relatif kecil yaitu sebanyak 58 orang. Secara rinci jumlah penduduk menurut pendidikannya sebagaimana pada tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Doktor (S3)	8 orang
2.	Pasca Sarjana (S2)	17 orang
3.	Sarjana (S1)	108 orang
4.	Diploma 3	90 orang
5.	Diploma 2	119 orang
6.	SLTA	591 orang
7.	SLTP	696 orang
8.	Sekolah Dasar	551 orang
9.	Tidak Tamat SD	533 orang
10.	Tidak Pernah Sekolah	58 orang
11.	Belum Sekolah	569 orang

Sumber : Monografi Desa Purbayan

Adapun prasarana sekolah beserta jumlah kelas, guru dan murid yang ada di Desa Purbayan sebagaimana pada tabel 9 di bawah ini.

Tabel 9

Prasarana Sekolah, Murid, Guru dan Kelas Di Desa Purbayan

No.	Nama Sekolah	Jumlah			Alamat
		Murid	Guru	Kelas	
1.	TK. Dharma Wanita	72	4	2	Rt.
2.	TK. Aisyiah	86	4	2	Rt.02 Rw.01
3.	TK Tiara	140	6	2	Rt.01 Rw.09
4.	SD Negeri I	183	14	6	Rt.04 Rw.04
5.	SD Negeri II	234	17	6	Rt.02 Rw.02

5) Lembaga Kemasyarakatan

Dalam rangka upaya mengantisipasi perkembangan dan tuntutan serta dinamika pembangunan di Desa Purbayan diperlukan lembaga kemasyarakatan yang kuat dan mandiri. Oleh karena itu lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Purbayan diharapkan dapat memiliki kemampuan sebagai penggerak dan pelaksana pembangunan yang mandiri.

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat sebagai wadah peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Lembaga kemasyarakatan tersebut yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KTI), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), merupakan wadah yang dibentuk atas prakasa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menunjang dan mewujudkan aspirasi kebutuhan demokrasi masyarakat di bidang pembangunan. Keanggotaan LKMD ditentukan oleh masyarakat dan kepengurusannya dipilih para anggota, ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan organisasi perempuan di tingkat Desa yang menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat Desa oleh kaum perempuan. Orientasi gerakan pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan peranan kaum perempuan dalam berbagai sektor pembangunan dengan prioritas pada 10 program pokok. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 program keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK (TP PKK). Keanggotaan TP.PKK terdiri dari unsur tokoh masyarakat/ pemuka masyarakat, isteri Pamong Desa.

Adapun sepuluh program pokok tersebut adalah : (1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; (2) Gotong Royong; (3) Pangan; (4) Sandang; (5) Perumahan dan Tata Laksana

Rumah Tangga; (6) Pendidikan dan Ketrampilan; (7) Kesehatan; (8) Pengembangan Kehidupan berkoperasi; (9) Kelestarian Lingkungan Hidup; (10) Perencanaan Sehat.

Kepengurusan PKK Desa Purbayan Kecamatan Baki dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 yang terdiri dari : (1) Ketua; (2) Ketua I; (3) Ketua II; (4) Sekretaris; (5) Bendahara dan (6) Kelompok-kelompok Kerja.

Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan tingkat desa mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan. Karangtaruna disamping sebagai wadah kegiatan bagi generasi muda di desa juga sebagai tempat pemberdayaan bagi para anggotanya untuk turut berperan aktif dalam pembangunan masyarakat. Struktur organisasi/ kepengurusannya Karangtaruna Desa Purbayan Kecamatan Baki terdiri atas (1) Ketua; (2); Wakil Ketua; (3) Sekretaris; (4) Bendahara; (5) Seksi-seksi.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan dewan atau majelis pimpinan kolektif masyarakat warga tingkat kelurahan yang dibangun secara sadar oleh warga untuk mengatasi persoalan yang dihadapi bersama, menggalang potensi, khususnya masalah kemiskinan yang mengedepankan nilai-nilai luhur (moralitas) dan berupaya untuk bersinergi dan

membangun saling percaya di antara masyarakat sendiri maupun dengan pihak luar dan mewakili masyarakat dalam berbagai kepentingan, termasuk kerjasama dengan pihak luar dengan memosisikan diri di luar lembaga pemerintah, agama, keluarga, militer, serta usaha.

Pembentukan BKM dan pemilihan anggota-anggotanya dilakukan melalui rembuk warga desa. Dalam rembuk warga di tingkat desa membahas draft Anggaran dasar BKM dan mengesahkannya sebagai AD BKM serta memilih dan menetapkan 9 sampai 13 anggota BKM.

BKM membentuk unit-unit pengelola sesuai kebutuhan. Setidak-tidaknya terdiri dari Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Lingkungan (UPL), dan Unit Pengelola Sosial (UPS).

UPK bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan BKM; UPL bertanggung jawab dalam hal penanganan rencana perbaikan kampung, penataan dan pemeliharaan prasarana lingkungan perumahan pemukiman, pelayanan yang baik kepada masyarakat di bidang permukiman, dan lain-lain; UPS bertanggung jawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerelawanan, mengelola pusat informasi dan pengaduan masyarakat (termasuk media warga untuk sarana kontrol sosial)

penanganan kegiatan komunitas belajar desa, kegiatan sosial dan lain-lain.

B Pelaksanaan Program P2KP di Desa Purbayan

Program P2KP yang dilaksanakan di Desa Purbaya Kecamatan Baki adalah merupakan pelaksanaan Siklus I tahap ke 1, 2 dan 3 yang dimulai sejak bulan Januari 2007. Pada tahap ke 1 program ini diawali dengan kegiatan sosialisasi awal, rebug kesiapan masyarakat dan pendaftaran relawan warga. Hal ini seperti dikemukakan oleh Koordinator Fasilitator Kelurahan sebagai berikut :

Program P2KP di desa Purbayan telah dimulai pada bulan Januari 2007, dan telah mendapatkan dana BLM Tridaya sebesar Rp.500.000.000,- untuk tahap ke 1 dan 2 sedang tahap ke 3 belum terealisasi. (wawancara 4 nopemeber 2009)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Koordinator BKM yang menyatakan sebagai berikut :

Untuk Desa Purbayan program P2KP pada siklus I yang dimulai bulan Januari 2007 telah menerima dana dua kali, tahap I sebesar Rp.300.000.000,- dan tahap II sebesar Rp.200.000.000,- Dana tersebut 70 % untuk bantuan pembangunan fisik, 20 % untuk ekonomi produktif yang berupa simpan pinjam dan 10 % untuk bantuan sosial. (wawancara 5 nopember 2009)

Pelaksanaan program P2KP siklus I telah dilaksanakan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelestarian atau pemeliharaan sesuai dengan pedoman pelaksanaannya. Sebagai gambaran lengkap tentang bagaimana pelaksanaan program P2KP siklus I di Desa

Purbayan Kecamatan Baki akan diuraikan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan ini merupakan tahap awal dari keseluruhan proses pelaksanaan program P2KP. Dalam tahap perencanaan ini dilaksanakan berbagai kegiatan dengan kurun waktu sekitar 1 tahun, yang dimulai dengan kegiatan sosialisasi awal dan lobby-lobby kepada Kelompok strategis di tingkat RW – RW seluruh Desa Purbayan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Koordinator Fasilitator sebagai berikut :

Pelaksanaan tahap perencanaan telah kita lakukan, dimulai dengan kegiatan sosialisasi yang kita lakukan di balai desa Purbayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, karangtaruna, RT dan RW. Dalam sosialisasi tersebut kita jelaskan tentang keberadaan program P2KP dan berbagai persiapan yang kita lakukan untuk mensukseskan program tersebut (wawancara 4 nopember 2009).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh salah seorang peserta, yaitu salah seorang Ketua RW di Purbayan yang menyatakan sebagai berikut :

Untuk perencanaan awal, saya pernah ikut sosialisasi di balai desa Purbayan, yang dihadiri oleh Perangkat desa serta tokoh-tokoh masyarakat, RW dan RT. Pada saat itu dijelaskan tentang adanya program P2KP yang akan diterima oleh desa Purbayan beserta rencana kegiatan yang akan dilakukan (wawancara 5 nopember 2009)

Dalam kaitannya dengan proses perencanaan kegiatan P2KP setelah diadakan sosialisasi awal dilakukan berbagai kegiatan, diantaranya adalah :

- 1) Rembug Kesiapan Masyarakat
- 2) Refleksi Kemiskinan
- 3) Pemetaan Swadaya
- 4) Pembentukan BKM
- 5) Penyusunan Program Jangka Menengah/ Renta Pronangkis
- 6) Membangun KSM

Adapun uraian lengkap dari masing-masing kegiatan tersebut sebagai berikut :

1) Rembug Kesiapan Masyarakat

Rembug kesiapan masyarakat (RKM) adalah serangkaian rembug/ rapat warga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perangkat kelurahan/ desa bekerjasama dengan Tim Fasilitator mulai di tingkat RT atau RW sampai dengan tingkat Kelurahan/ Desa dengan mengundang semua warga Kelurahan/ Desa secara terbuka. Kegiatan ini pada prinsipnya menyiapkan warga untuk melaksanakan program P2KP di wilayahnya.

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Koordinator BKM sebagai berikut :

Sebagai tindak lanjut dari sosialisasi awal kita melakukan rembug kesiapan masyarakat (RKM) di balai desa Purbayan. Yang dibahas dalam Rembug tersebut adalah kesiapan warga untuk melakukan kegiatan program P2KP sehingga dalam diri warga tumbuh tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap program P2KP(wawancara 5 desember 2009)

Apa yang dikemukakan Koordinator BKM tersebut dibenarkan oleh Ketua KSM Menur sebagai berikut :

Fasilitator telah mengundang warga untuk melakukan RKM di Balai desa. Dalam rembug warga yang dilakukan di Balai Desa Purbayan telah membahas kesiapan kesanggupan warga melaksanakan kegiatan P2KP di tingkat RT (wawancara 9 desember 2009)

Kegiatan rembug warga pada prinsipnya telah dilaksanakan dengan baik di Desa Purbayan dimana hasilnya adalah adanya kesiapan warga dari tiap RT untuk mendaftarkan sebagai relawan.

Ini seperti dinyatakan oleh Ketua KSM Melati sebagai berikut :

Sebagai hasil dari RKM tersebut adalah dengan munculnya kesadaran warga untuk menjadi relawan dalam program tersebut. Beberapa warga sangat antusias dalam menanggapi program tersebut, hingga bersedia menjadi relawan untuk mendukung pelaksanaan program P2 KP tersebut (wawancara 10 desember 2009).

Hal ini dibenarkan salah seorang warga yang menjadi relawan sebagai berikut :

Kami warga sangat antusias menyambut program tersebut. Karena program tersebut dari , oleh dan untuk warga maka kami beberapa warga tertarik untuk menjadi relawan guna mensukseskan program tersebut (wawancara desember 2009)

2) Refleksi Kemiskinan

Setelah dilakukan Rembug Kesiapan warga maka kegiatan refleksi kemiskinan dilakukan oleh para pelaksana. Refleksi kemiskinan adalah kegiatan msyarakat melalui diskusi kelompok atau Focus Group Discussion (FGD) dan rembug warga untuk memahami kemiskinan di wilayahnya. Adapun tujuan dari Refleksi Kemiskinan (RK) yaitu :

- a) Membangun kesadaran kritis masyarakat mengenal permasalahan kemiskinan yang bersumber pada lunturnya nilai-nilai kemanusiaan.
- b) Membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka harus menjadi bagian dari pemecahan masalah bukan sebaliknya.

Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh Koordinator BKM sebagai berikut :

Refleksi kemiskinan adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan untuk membangun kesadaran warga untuk mengenali masalah kemiskinan di wilayahnya dengan cara mengumpulkan data keluarga miskin oleh para relawan. Tujuan refleksi kemiskinan yaitu diperolehnya data warga miskin yang perlu untuk dientaskan (wawancara 10 desember 2009)

Pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh Ketua KSM Menur yang mengemukakan sebagai berikut :

Para relawan yang dibentuk berdasarkan RKM dalam mensukseskan dan melaksanakan program P2KP dengan kesadaran penuh melakukan pendataan terhadap keluarga miskin sesuai dengan kriteria, dengan tujuan untuk mendapatkan data keluarga miskin yang perlu dientaskan. Mereka bekerja dengan semangat sesuai dengan harapan masyarakat (wawancara desember 2009)

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai apa yang diharapkan dari program P2KP. Hal ini dibuktikan dengan telah tersusunnya data keluarga miskin di tiap RT. Ini seperti dinyatakan oleh Kepala desa Purbayan sebagai berikut :

Sebagai dampak dari pelaksanaan P2KP yaitu melalui para relawan, maka sekarang desa menjadi memiliki data warga miskin di tingkat RT hal ini sangat membantu kami selaku penyelenggara pemerintahan desa (wawancara desember 2009)

3) Pemetaan Swadaya

Kegiatan berikutnya dalam tahap perencanaan adalah apa yang disebut pemetaan Swadaya. Pemetaan swadaya merupakan serangkaian kegiatan dimana masyarakat belajar mengidentifikasi permasalahan, potensi dan kebutuhan bersama secara kritis berdasarkan pada kekayaan informasi lokal. Subtansi dari pemetaan swadaya ini adalah :

- a) Masyarakat belajar memahami masalah-masalah kemiskinan dan potensi, baik sumberdaya manusia maupun kemampuan ekonomis, serta kemungkinan perkembangannya secara utuh.
- b) Masyarakat belajar menyusun gambatran kondisi masyarakat dan wilayahnya saat ini serta gambaran yang diharapkan.
- c) Masyarakat belajar menggali potensi sendiri dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan dan kemiskinan dalam kelurahan/ desanya.
- d) Masyarakat belajar untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dan mengurangi ketergantungan pada bantuan atau sumber daya dari luar (Juklak P2KP)

Hal demikian sesuai apayang dikemukakan oleh Koordinator BKM yaitu bahwa :

Kegiatan pemetaan swadaya adalah salah satu proses dalam program P2KP yang bertujuan agar masyarakat mampu memahami masalah-masalah kemiskinan dan potensi yang ada dalam masyarakatn lingkungannya dan mampu menggali potensi sendiri dan memanfaatkan potensi tersebut untuk mengatasi

permasalahan kemiskinan yang ada dalam wilayahnya (wawancara desember 2009).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh fasilitator kelurahan dalam wawancara yang dilakukan tanggal 14 Desember 2009 bahwa :

Tujuan dari pemetaan swadaya agar masyarakat memahami keadaan wilayahnya sendiri dalam hal masalah kemiskinan di wilayahnya maupun potensi yang dimilikinya serta agar masyarakat mampu mengatasi sendiri terhadap permasalahan kemiskinan dengan potensi yang dimilikinya.

Seperti halnya beberapa kegiatan awal yang dilakukan, kegiatan pemetaan swadaya ini juga dapat berjalan dengan baik dengan hasil berupa:

- a. Peta dan profil keluarga miskin
- b. Peta dan profil masalah dan potensi wilayah dan kebutuhan
- c. Peta dan profil kelembagaan dan organisasi

4. Pembentukan BKM

Pembentukan BKM sangat penting mengingat bahwa program P2KP merupakan program pengentasan kemiskinan yang melalui pemberdayaan masyarakat berbasis kelembagaan lokal. Kelembagaan lokal yang dimaksud adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini berupa BKM.

Hal ini sesuai apa yang dikemukakan oleh Koordinator BKM yang menyatakan sebagai berikut :

Peran BKM adalah membangun modal sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas serta kesatuan sosial warga melalui kejasama guna memperkuat keswadayaan masyarakat warga. BKM dibentuk melalui rebug warga tingkat desa. Di desa Purbayan sendiri pembentukan BKM telah dilakuaknd engan baik dan lancar (wawancara desember 2009)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Fasilitator

Kelurahan/ Desa bahwa :

BKM merupakan organisasi lokal yang dibentuk oleh warga secara demokratis dari perwakilan RT, tiap RT mengirimkan 5 orang warga. Tujuan pembentukan BKM adalah sebagai wadah untuk membantu aspirasi dan prakasa masyarakat dalam merumuskan kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan di desa. Kepemimpinan organisasi BKM bersifat kolektif (wawancara desember 2009).

Pembentukan BKM di desa Purbayan dapat berjalan lancar. Hal ini dibuktikan dengan telah tersusunnya Anggaran Dasar BKM maupun kepengurusan BKM.

Adapun kepengurusan BKM Desa Purbayan bersifat kolektif yaitu :

Koordinator : Ir. Gunawan

Wakil : Waluyo

Sekretaris : Bp. Drs. Mawardi

Anggota : 1. Bp. Slamet

2. Ny. Watiyem

Ny. Ismi Prihatin

Bp. Sutikno

Bp. Margono

Bp. Agus Suratman

Bp. Sutrisno

Bp. Drs. Mawardi

Ny. Lestari

Bp. Mulyono

Bp. Imam Mashuri

UPK : Ny. Rosini

UPL : Bp. Kasno

UPS : Bp. Subandi

Adapun tugas pokok BKM adalah :

- a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan serta aturan mainnya (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif.
- b) mengorganisasikan masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis dan rencana program penanggulangan kemiskinan (Pronangkis)
- c) Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BKM, termasuk penggunaan dana P2KP.
- d) Mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalan ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilain kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi.

- e) Memutuskan proposal mana yang diprioritaskan didanai oleh dan P2KP setelah dilakukan penilaian oleh unit-unit pelaksana
- f) Memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah desa atau kelurahan.
- g) Menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan. Di wilayahnya
- h) Membuka peluang (akses) dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan yang berada di bawah kendali BKM.
- i) Membantu (memfasilitasi) aspirasi dan prakasa masyarakat dalam merumuskan kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah.
- j) Menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat.
- k) Merencanakan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan ekonomi rakyat, dan peningkatan kualitas lingkungan.
- l) Membantu (memfasilitasi) jejaring (networking) kerja sama dengan berbagai potensi sumber daya yang berada di luar lingkungan masyarakat setempat.

Sedangkan Tugas Unit Pengelola Keuangan (UPK) :

- (1) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan ekonomi;
- (2) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM dengan kegiatan ekonomi;
- (3) Melakukan pengelolaan keuangan pinjaman bergulir untuk KSM, mengadministrasikan keuangan; dan
- (4) menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain yang mendukung program KSM.

Sementara itu untuk Tugas Unit Pengelola Lingkungan (UPL) adalah :

- (1) melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM ;
- (2) Mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan KSM;
- (3) Motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakatn untuk penataan lingkungan perumahan dan permukiman yang lestari, sehat dan terpadu;
- (4) menggali potensi lokal yang ada di wilayahnya;
- (5) Menjalin dengan pihak-pihak lain yang mendukung program lingkungan UPL.

Selanjutnya untuk Unit Pengelola Sosial (UPS), tugasnya adalah :

- (1) Melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM;
- (2) Mengendalikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM bidang sosial;

- (3) Membangun/ mengembangkan kontrol sosial masyarakat melalui media warga/ infokom;
- (4) Memfasilitasi dan mendorong masyarakat/ relawan dalam komunitas Belajar Kelurahan/ Desa (KBK/D);
- (5) Mendorong kepedulian dalam kegiatan sosial seperti santunan, beasiswa, sunatan amssal;
- (6) Menjalin kemitraan dengan pihak-pihak lain yang mendukung program sosial UPS.

5. Penyusunan Program Jangka Menengah/ Renta Pronangkis

Penyusunan program penanggulangan kemiskinan merupakan kegiatan awal bersama relawan, masyarakat serta pemerintah kelurahan dan kelompok peduli setempat, untuk merencanakan langkah-langkah dalam bentuk program jangka menengah dan rencana tahunan penanggulangan kemiskinan. Dalam hal ini BKM diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat setempat untuk menyampaikan aspirasinya, memberikan masukan, saran dan usulan dan inisiatifnya.

Hal tersebut seperti dikemukakan oleh Kepala Desa sebagai berikut :

Dalam penyusunan program, BKM dan pemerintah desa memberikan arahan dan gambaran umum terhadap permasalahan kemiskinan di desa serta kebutuhan-kebutuhan yang mendesak bagi desa. Maka dalam penyusunan program ini masyarakat yang lebih aktif memberikan masukan-masukan dan yang mempunyai

inisiatif terhadap rencana pelaksanaan program P2KP (wawancara desember 2009)

Hal senaga dibenarkan oleh Ketua KSM Menur dengan pernyataanya sebagai berikut :

Anggota masyarakat yang diwakili relawan memberikan masukan-masukan dan usulan rencana kegiatan yang perlu ditampung dalam program jangka menengah sesuai dengan permasalahan di tiap RT (wawancara desember 2009)

Kegiatan penyusunan program jangka menengah (PJM)/ rencana tahunan penanggulangan kemiskinan (Pronangkis) dapat berjalan baik dan lancar, hal ini terbukti telah tersusunnya PJM/ Pronangkis . Program ini sebagai acuan dari KSM dalam menyusun proposal pengajuan kegiatan ke BPD.

6. Membangun Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Yang dimaksud KSM disini adalah kumpulan orang yang menghimpun secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu yaitu kepentingan dan kebutuhan yang sama sehingga dalam kelompok memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Posisi KSM dalam P2KP adalah pelaku langsung, namun bukan bawahan BKM atau unit Pengelola. Hubungan KSM dengan unit Pengelola, dan BKM adalah kemitraan.

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Ketua KSM Menur bahwa :

KSM dibentuk oleh warga yang menjadi relawan-relawan yang akan melaksanakan program P2KP di wilayahnya. Hubungan

dengan BKM dan Unit Pengelola sebagai mitra kerja dalam melaksanakan program P2KP (Wawancara desember 2009).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Wakil koordinator BKM bahwa :

Pelaksana langsung program P2KP adalah para relawan yang telah membentuk KSM. Dan KSM bukan berada di bawah BKM maupun Unit Pengelola, namun dalam melaksanakan program P2KP KSM dimonitor dan diawasi oleh BKM karena proposal dari KSM diajukan kepada BKM. (wawancara desember 2009)

Kegiatan membangun KSM tersebut dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Ini dapat dilihat dari telah terbentuknya KSM-KSM. Adapun jumlah KSM di Desa Purbayan 24 kelompok KSM bidang lingkungan

Peran dan fungsi KSM adalah :

- a) Sebagai sarana proses perubahan sosial, pendorong terjadinya perubahan paradig, pembiasaan praktek-praktek nilai baru, cara pandang dan cara kerja baru.
- b) Sebagai wadah pembahasan dan penyelesaian masalah yang dihadapi kelompok.
- c) Sebagai wadah aspirasi untuk menerima, membahas dan menyalurkan, kepada pihak-pihak yang relevan dengan berpijak pada hak-hak warga
- d) Sebagai wadah menggala saling percaya (trust) melalui cara penjaminan, dan rekomendasi kelompok, yaitu ketika kelompok membangun dengan pihak lain.

- e) Sebagai sumber ekonomi, yaitu ketika anggota/ masyarakat membutuhkan dana maka KSM bisa berfungsi sebagai sumber keuangan.

Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Koordinator BKM bahwa :

KSM mempunyai peran yang strategis dalam pelaksanaan program P2KP karena dengan melalui wadah KSM masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan swadaya masyarakat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayahnya. Di Purbayan telah berhasil dibentuk 24 KSM yang tersebar di masing-masing RT (wawancara desember 2009)

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa bahwa :

Untuk mengembangkan swadaya masyarakat dalam mengatasi kemiskinan di wilayahnya maka sangat strategis sekali dibentuknya instusi local yaitu KSM

Tujuan dibentuknya KSM sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Di seluruh wilayah desa Purbayan berhasil dibentuk 24 KSM yang barda di tiap-tiap RT(wawancara desember 2009)

Peran KSM tersebut telah dilakukan oleh KSM yang ada dengan baik hal ini dapat dibuktikan dengan semakin semangatnya anggota relawan dalam melakukan kegiatan pembangunan lingkungannya. Semua KSM yang dibentuk diberi nama bunga dan nama burung.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap berikutnya setelah perencanaan adalah tahap pelaksanaan. Yang dimaksud dengan pelaksanaan kegiatan adalah

setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan program. Hal ini berkaitan dengan setiap kegiatan program P2KP terutama yang berhubungan dengan penggunaan dana sesuai dengan rencana dan tujuan yang hendak dicapai.

Pelaksanaan kegiatan P2KP dibagi dalam dua tahapan yaitu sebagai berikut :

1) Tahap pencairan dana

Pencairan dana untuk program P2KP di desa Purbayan dilakukan dalam tiga termin yaitu termin kesatu 30 % , kedua 50 % , ketiga 20 % . dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) KSM menyusun proposal kegiatan dan diajukan ke BKM
- b) BKM meneliti proposal dan mengklasifikasi prioritas kegiatan
- c) BKM menyerahkan proposal ke Koordinator Kota/ Kabupaten (KORKOT/ KORKAB) melalui Fasilitator Kelurahan (Fakel)
- d) Setelah cair dananya, BKM menyerahkan ke KSM

Alokasi dana tersebut diperuntukan kegiatan fisik 70 % , kegiatan bantuan simpan pinjam 20 % dan bantuan sosial 10 %

Hal ini seperti dikemukakan oleh Koordinator BKM sebagai berikut :

Setelah KSM terbentuk maka KSM menyusun proposal kegiatan untuk wilayahnya sesuai dengan permasalahannya dan kemudian diserahkan ke BKM. Proposal tersebut diteliti oleh BKM untuk penentuan prioritas kegiatan yang didanai oleh dana P2KP. Dana P2KP dicairkan melalui tiga termin yaitu ; termin kesatu 30 % , termin kedua 50 % dan termin ketiga 20 % . Adapun alokasi dana 70 % dipergeruntukan pembangunan sarana prasarana, 20 % untuk

usaha ekonomi produktif dan bantuan sosial 10 % (wawancara januari 2010)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Faskel bahwa :

Dana P2KP dicairkan melalui tiga termin,yaitu termin pertama 30 %, termin kedua 50 % dan termin ketiga 20 %. Dana tersebut cair setelah KSM menyerahkan proposal kegiatan beserta RAB nya ke BKM untuk diteliti dalam rangka memutuskan prioritas kegiatan yang didanai oleh dana P2KP yang kemudian BKM menyerahkan proposal ke Koordinator Kota/ Kabupaten melalui Fasilitator Kelurahan/ Desa. Sedang dana tersebut peruntukannya adalah 70 % untuk pembangunan sarana prasarana , 20 % untuk simpan pinjam dan 10 % untuk bantuan social (wawancara januari 2010).

Selama pelaksanaan program P2KP sampai saat ini jumlah yang telah tercairkan dan dipergunakan pembiayaan pembangunan fisik, simpan pinjam dan bantuan sosial sebanyak Rp.500.000.000,- dikurangi untuk operasional BKM sebesar Rp.15.000.000,- sehingga dana untuk kegiatan sebesar Rp.485.000.000,-. Adapun perincian penggunaan dana tersebut sebagai berikut :

- Pembangunan sarana dan prasarana Rp. 339.500.000,-
- Simpan pinjam Rp.97.000.000,-
- Bantuan sosial Rp.48.500.000,-

2) Tahap pelaksanaan kegiatan

Setelah dana dicairkan maka sesuai dengan yang tertuang dalam proposal yang diajukan oleh KSM khususnya dana untuk pembangunan sarana prasarana segera digunakan sebagaimana mestinya.

Adapun realisasi dana untuk pembangunan sarana dan prasarana di desa Purbayan nampak sebagaimana pada tabel 10 di bawah ini :

Tabel 10
Realisasi Dana Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana s.d tahun 2009

NO.	NAMA KSM	ALAMAT	KEGIATAN FISIK	VOLUM E	DANA P2KP	SWADAYA	% Swadaya
1.	Melati	Rt.01/I	Pemb.saluran limbah Reehab jalan aspal	70,00 m ² 729,00 m ²	Rp.29.850.000,-	Rp.9.560.000,-	32,02%
2.	Seruni	Rt.03/VI	Pemb. jalan beton	589,00 m ²	Rp.16.800.250,-	Rp.5.040.000,-	30%
3.	Kenikir	Rt.02/IV	Pemb.jalan beton	100,00 m ²	Rp. 4.500.000,-	Rp.1.926.000,-	42,82%
4.	Bougenvile	Rt.01/IV	Pemb. jalan beton	300,00 m ²	Rp.15.000.000,-	Rp.6.420.000,-	42,80%
5.	Wijaya Kusuma	Rt.02/V	Pemb. saluran beton	120,00 m ²	Rp. 7.000.000,-	Rp.3.210.000,-	45,86%
6.	Anggrek	Rt.01/V	Pemb.saluran batu kali	100,00 m ²	Rp.11.375.000,-	Rp.4.875.000,-	42,80%
7.	Matahari 1	Rt.01/VI	Pemb.jalan beton	300,00 m ²	Rp.13.650.000,-	Rp.5.842.000,-	42,80%
8.	Mondokaki 1	Rt.02/VII	Pemb.saluran limbah	120,00 m ²	Rp. 6.000.000,-	Rp.2.568.000,-	42,80%
9.	Ceplok Piring	Rt.02/VII	Pemb.jalan beton	216,00 m ²	Rp. 9.610.000,-	Rp.4.113.000,-	42,80%
10.	Krisan	Rt.03/VII	Pemb. jalan aspal	300,00 m ²	Rp.15.000.000,-	Rp.6.420.000,-	42,80%
11.	Menur	Rt.05/I	Pemb.jalan beton	225,00 m ²	Rp. 9.000.000,-	Rp.4.170.000,-	46,33%
12.	Begonia 1	Rt.03/IV	Pemb.jalan beton	188,00 m ²	Rp. 8.015.000,-	Rp.3.601.000,-	44,43%
13.	Begonia 2	Rt.03/IV	Pemb. Gorong2	5,00 m ²	Rp. 3.050.000,-	Rp.1.498.000,-	49,11%
14.	Nusa Indah	Rt.03/V	Pemb.jalan beton	160,50 m ²	Rp. 6.750.000,-	Rp.2.889.000,-	42,80%
15.	Matahari 2	Rt.01/VI	Pemb.selokan batu kali	135,00 m ²	Rp. 8.800.000,-	Rp.4.040.000,-	45,91%
16.	Matahari 3	Rt.01/VI	Pemb.jalan beton	140,00 m ²	Rp. 6.010.000,-	Rp.2.772.000,-	46,12%
17.	Mondokaki 2	Rt.01/VII	Pemb.jalan beton	180,00 m ²	Rp. 8.100.000,-	Rp.2.466.000,-	30,44%
18.	Menur 2	Rt.05/I	Pemb.jalan aspal	694,40 m ²	Rp.27.725.000,-	Rp.13.044.000,-	47,05%
19.	Kamboja	Rt.01/III	Pemb.jalan beton	330,00 m ²	Rp.12.700.000,-	Rp.5.444.000,-	42,87%
20.	Mondokaki 3	Rt.01/VII	Pemb.talud batu kali	18,70 m	Rp. 9.900.000,-	Rp.4.234.000,-	42,77%
21.	Mawar	Rt.02/I	Pemb.jalan aspal	350,00 m ²	Rp.17.475.000,-	Rp.8.067.000,-	46,16%
22.	Matahari 4	Rt.01/VI	Pemb.jalan beton	150,00 m ²	Rp. 8.950.000,-	Rp.3.867.000,-	43,21%
23.	Azalia	Rt.02/II	Pemb.talud batu kali	76,10 m ²	Rp.19.740.000,-	Rp.8.792.500,-	44,54%
24.	Kemuning 1	Dk Tempel	Pemb. Jembatan TPS	7,00 m	p.19.681.000,-	Rp.8.435.000,-	42,85%
25.	Kemuning 2	Dk. Tempel	Pemb. Tempat Pembuangan Sampah	35,00 m ²	p.16.500.000,-	Rp.7.072.000,-	42,86%
26.	Begonia 2	Rt.02/ VII	Pemb. Gorong2	12 m	Rp. 3.819.000,-	Rp.1.637.000,-	41,77%
	Jumlah				Rp.315.000.250 ,-	Rp.132.102.500,-	41,93%

Dari tabel di atas nampak bahwa jumlah dana yang diperuntukan pembangunan sarana dan prasarana yang berasal dari P2KP sebagian besar telah diimbangi dengan swadaya dari masyarakat berupa bantuan material dan tenaga kerja yang dikonversi dengan nilai uang mencapai rata-rata 41,93% . Hal ini seperti dikemukakan oleh Faskel sebagai berikut :

Meskipun desa memperoleh bantuan dana akan tetapi bukan berarti tidak ada swadaya masyarakatnya. Hasil swadaya masyarakat berupa bantuan material dan tenaga kerja yang dikonversi dengan nilai uang mencapai 41,93% . Ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program tersebut (wawancara januari 2010)

Hal itu dibenarkan oleh Kepala desa Purbayan yang menyatakan sebagai berikut :

Kesadaran masyarakat untuk berswadaya di desa Purbayan cukup tinggi. Meski sudah memperoleh bantuan dana untuk pembangunan fisik akan tetapi masyarakat tetap memberikan bantuan baik berupa material maupun tenaga kerja untuk mensukseskan program tersebut (wawancara Januari 2010)

Sedang untuk dana simpan pinjam telah disalurkan kepada masyarakat melalui KSM Simpan Pinjam yang ada. Adapun rincian penggunaannya sebagaimana pada Tabel 11 berikut ini

Tabel 11

Realisasi Dana P2KP Yang Diperuntukan Simpan Pinjam
di Desa Purbayan Kecamatan Baki

NO.	NAMA KSM	ALAMAT	ALOKASI PINJAMAN	BUNGA / 1,5%/ bl (Dlm 10 bl)
1.	Alamanda	Rt. 04/ Rw.08	Rp.5.000.000,-	Rp.750.000,-
2.	Mekarsore	Rt.03/ Rw.09	Rp.5.000.000,-	Rp.750.000,-
3.	Kamboja	Rt.01/ Rw.08	Rp.4.000.000,-	Rp.600.000,-
4.	Lili	Rt.02/ Rw.01	Rp.3.000.000,-	Rp.450.000,-
5.	Krisan	Rt.03/ Rw.07	Rp.4.500.000,-	Rp.675.000,-
6.	Menur Palembang	Rt.01/ Rw.08	Rp.3.500.000,-	Rp.525.000,-
7.	Kenanga	Rt.02/ Rw.08	Rp.4.500.000,-	Rp.675.000,-
8.	Anggrek 1	Rt.02/ Rw.01	Rp.4.500.000,-	Rp.675.000,-
9.	Sedap Malam	Rt.03/ Rw.02	Rp.5.000.000,-	Rp.750.000,-
10.	Menur Melati 1	Rt.03/ Rw.01	Rp.3.500.000,-	Rp.525.000,-
11.	Sepatu	Rt.01/ Rw.09	Rp.5.000.000,-	Rp.750.000,-
12.	Matahari 2	Rt.02/ Rw.06	Rp.4.000.000,-	Rp.600.000,-
13.	Ceplok Piring 2	Rt.03/ Rw.07	Rp.4.000.000,-	Rp.600.000,-
14.	Anggrek 2	Rt.01/ Rw.01	Rp.5.000.000,-	Rp.750.000,-
15.	Beruang	Rt.02/ Rw.08	Rp.3.000.000,-	Rp.450.000,-
16.	Kaka Tua	Rt.01/ Rw.01	Rp.3.000.000,-	Rp.450.000,-
17.	Cendrawasih	Rt.03/ Rw.01	Rp.2.000.000,-	Rp.300.000,-
18.	Perkutut	Rt.01/ Rw.01	Rp.2.000.000,-	Rp.300.000,-
19.	Kenari	Rt.01/ Rw.01	Rp.2.000.000,-	Rp.300.000,-
20.	Rajawali	Rt.02/ Rw.06	Rp.5.000.000,-	Rp.750.000,-
21.	Garuda	Rt.04/ Rw.08	Rp.3.500.000,-	Rp.525.000,-
22.	Kangguru	Rt.01/ Rw.03	Rp.3.000.000,-	Rp.450.000,-
23.	Parkit	Rt.01/ Rw.07	Rp.3.500.000,-	Rp.525.000,-
24.	Murai	Rt.02/ Rw.07	Rp.3.500.000,-	Rp.525.000,-
25.	Kelinci	Rt.01/ Rw.07	Rp.1.000.000,-	Rp.150.000,-
	Jumlah		Rp.90.000.000,-	Rp.13.500.000,-

Sumber : Laporan P2KP desa Purbayan

Dari hasil simpan pinjam tersebut di atas ternyata telah berhasil dikelola dengan baik, sehingga dana dapat digulirkan ke KSM yang lain sebagaimana pada Tabel 12 berikut ini :

Tabel 12

Data KSM Yang Mendapat Dana Bergulir Untuk Simpan Pinjam

NO.	NAMA KSM	ALAMAT	ALOKASI PINJAMAN	BUNGA/ 1,5%/ bl (Dlm 10 bl)
1.	Aster 1	Rt.02/ Rw.06	Rp.3.000.000,-	Rp.450.000,-
2.	Matahari 1	Rt.02/ Rw.06	Rp.3.500.000,-	Rp.525.000,-
3.	Kamboja	Rt.01/ Rw.03	Rp.4.000.000,-	Rp.600.000,-
4.	Ceplok Piring	Rt.03/ Rw.01	Rp.4.000.000,-	Rp.600.000,-
5.	Mawar	Rt.02/ Rw.01	Rp.3.500.000,-	Rp.525.000,-
6.	Kamboja 2	Rt.03/ Rw.03	Rp.4.000.000,-	Rp.600.000,-
7.	Aster 2	Rt.02/ Rw.06	Rp.3.000.000,-	Rp.450.000,-
8.	Lili	Rt.02/ Rt.01	Rp.3.000.000,-	Rp.450.000,-
9.	Kenanga	Rt.02/ Rw.08	Rp.4.500.000,-	Rp.675.000,-
10.	Alamanda	Rt.04/ Rw.08	Rp.3.500.000,-	Rp.525.000,-
11.	Menur Palembang 2	Rt.01/ Rw.08	Rp.5.000.000,-	Rp.750.000,-
12.	Krisan 2	Rt.03/ Rw.07	Rp.4.500.000,-	Rp.675.000,-
13.	Krisan 3	Rt.02/ Rw.07	Rp.4.500.000,-	Rp.675.000,-
14.	Menur Melati	Rt.03/ Rw.01	Rp.5.000.000,-	Rp.750.000,-
15.	Aster 3	Rt.02/ Rw.06	Rp.3.000.000,-	Rp.450.000,-
16.	Kamboja 3	Rt.02/ Rw.07	Rp.4.000.000,-	Rp.600.000,-
17.	Mondaki	Rt.01/ Rw.07	Rp.5.000.000,-	Rp.750.000,-
18.	Kelinci	Rt.02/ Rw.07	Rp.1.500.000,-	Rp.225.000,-
	Jumlah		Rp.69.000.000,-	Rp.10.350.000,-

Sumber : Laporan P2KP desa Purbayan

Dana simpan pinjam tersebut disalurkan BKM ke keluarga miskin melalui KSM.

Dari data tersebut, dana simpan pinjam dapat digulirkan hingga mencapai lebih dari 75 %. Pada umumnya anggota masyarakat/ keluarga miskin yang mendapat pinjaman dapat mengangsur tepat waktu. Namun demikian juga ada beberapa anggota yang mengalami

keterlambatan angsuran., hal ini karena adanya anggota KSM yang bersangkutan dalam usahanya mengalami gulung tikar dan penggunaannya bukan untuk pengembangan usahanya tetapi untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya berobat, pendidikan, sumbangan pesta perkawinan.

Hal ini sesuai dikatakan oleh Petugas Unit Pengelola Keuangan sebagai berikut ;

Dana simpan pinjam dari P2KP untuk warga miskin diberikan melalui KSM sesuai proposal yang masuk yang dipergunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif dan bersifat simpan pinjam bergulir. Pada umumnya KSM dapat mengangsur tepat waktu, namun ada beberapa anggota KSM yang mengalami keterlambatan dalam pengangsuran, hal ini karena ada salah satu anggota KSM yang mengalami gulung tikar dalam usahanya dan juga penggunaan uang pinjaman bukan untuk pengembangan usahanya tetapi untuk keperluan biaya pendidikan, berobat atau untuk sumbangan pesta perkawinan. (wawancara januari 2010)

Apa yang dikatakan petugas UPK tersebut dibenarkan oleh Koordinator BKM yang menyatakan bahwa :

Kegiatan simpan pinjam yang didanai oleh P2KP dan dikelola oleh KSM cukup mengembirakan mengingat dana dapat digulirkan hingga 75%, namun demikian ada yang mengalami keterlambatan dalam pengangsuran dikarenakan adanya anggota KSM yang mengalami kebangkrutan dalam usahanya (wawancara januari 2010).

Pernyataan diatas menandakan bahwa program pemberdayaan ekonomi melalui simpan pinjam di desa Purbayanpun telah berjalan dengan baik.

Sedang dana untuk kegiatan sosial dikelola oleh petugas UPS dan telah disalurkan untuk berbagai kegiatan. Adapun rinciannya sebagaimana pada table 13 di bawah ini

Tabel 13

Jenis Kegiatan Sosial Yang Dilaksanakan Oleh KSM di Desa Purbayan

NO.	KEGIATAN	SASARAN/ VOLUME	JUMLAH DANA	PELAKSANA
1.	Pelatihan ketrampilan pembuatan pupuk organik	Warga kurang mampu/ 37 org	Rp. 2.500.000,-	KSM Dahlia Rt.05/ Rw. IX
2.	Bantuan pendidikan wajib belajar 9 tahun	Siswa SD/ SMP warga kurang mampu/ 60 anak	Rp. 6.275.000,-	KSM Angrek Rt.01/ Rw.VII
3.	Pelatihan pembuatan pupuk cair organik	Warga kurang mampu/ 38 org	Rp.2.662.500,-	KSM Dahlia Rt.05/ Rw.IX
4.	Pelatihan budidaya tanaman	Warga kurang mampu/ 38 org	Rp.2.662.500,-	KSM Hijau Daun Rt.03/ Rw.VI
5.	Pelatihan memasak	Warga kurang mampu/ 38 org	Rp.4.625.000	KSM Bougenvil Rt.04/ Rw.IX
6.	Pelatihan computer dan manajem dasar	Siswa SD dari warga kurang mampu/ 38 anak	Rp.4.500.000,-	KSM Kemuning Rt.01/ Rw.VIII
7.	Bantuan bagi orang cacat fisik dan mental	Penyandang cacat dari warga kurang mampu	Rp.3.850.000,-	KSM Mekarsore Rt.03/ Rw.IX
8.	Bantuan rehab rumah kurang layak huni	Warga kurang mampu/ 6 unit	Rp.18.000.000,-	KSM Rehab Rumah Rt.01/ Rw.IV

Sumber : BKM “Purbo Manunggal“ Desa Paurbayan

Dari data tersebut di atas nampak bahwa kegiatan social berupa pengembangan ketrampilan warga dan bantuan langsung untuk pendidikan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Dari semua uraian diatas nampak bahwa dalam tahap pelaksanaan baik pencairan dana maupun kegiatan pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan harapan. Program pembangunan fisik dapat berhasil baik dengan dukungan swadaya masyarakat, dana simpan pinjam bias bergulir dengan baik, sementara untuk bidang social bias digunakans esuai dengan yang seharusnya.

c. Tahap Pengendalian

Setelah pelaksanaan kegiatan dilakukan maka tahapan berikutnya adalah melakukan pengawasan atau pengendaliannya. Pengendalian program P2KP dilakukan melalui pemantauan, pelaporan, pemeriksaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Adapun tujuannya adalah :

- 1) Agar proses pelaksanaan program P2KP sesuai dengan aturan dan tujuan program.
- 2) Agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
- 3) Agar hasil kegiatan dan pemanfaatan dana sesuai dengan rencana dan transparan.
- 4) Agar dapat mengendalikan pelaku P2KP secara baik sehingga sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Untuk kegiatan pemantauan program P2KP di desa Paurbayan telah dilakukan secara terus menerus pada setiap tahap kegiatan baik yang dilakukan oleh POKJA BKM, BKM maupun Faskel.

Hal itu seperti yang dikemukakan oleh Fasilitator Kelurahan, dalam wawancara yang dilakukan tanggal 22 Desember 2009 sebagai berikut :

Kegiatan pemantauan terhadap program P2KP di Desa Purbayan dilakukan secara rutin tiap seminggu sekali oleh Fasilitator Kelurahan dan BKM baik pemantauan administrative maupun di lapangan. Dalam kegiatan ini bukan saja melihat bagaimna pelaksanaannya akan tetapi juga memebrikan berbagai masukan perbaikan jika terjadi persoalan dalam pelaksanaan kegiatan.

Hal itu dibenarkan oleh Lurah / Kepala desa Purbayan yang menyatakan sebagai berikut :

Agar pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari rencana maupun penggunaan anggaran perlu kita laksanakan pemantauan secara rutin, baik yang dilakukan intern BKM maupun ekstern. Kegiatan ini untuk mengurangi terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.(wawancara januari 2010)

Dari hasil pemantauan yang telah dilakukan seta dari laporan yang ada ternyata di desa Purbayan tidak ditemukan indikasi terjadinya penyimpangan aturan tau rencana yang telah ditentukan. Hal ini seperti dikemukakan oleh Fasilitator Kelurahan/ Desa sebagai berikut :

Berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, maka kegiatan P2KP di Desa Purbayan tidak ditemukan indikasi penyimpangan yang prinsip dalam pelaksanaannya, walaupun masih ada kegiatan yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat (wawancara januarai 2010).

Hal itu senada yang dikemukakan oleh Lurah/ Kepala Desa Purbayan sebagai berikut :

Bahwa pelaksanaan kegiatan P2KP di Desa Purbayan berjalan sesuai dengan aturan dan rencana yang telah ditentukan, tidak ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan maupun anggaran. Namun masih ada kegiatan yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat. (wawancar januari 2010)

Pernyataan senada dikemukakan oleh salah seorang relawan sebagai berikut :

Menurut pengamatan saya selama ini pelaksanaan semua kegiatan berjalan baik dan tidak terdengar adanya penyimpangan atau penyelewengan baik dalam hal penggunaan dana maupun pada aspek yang lain (wawancara januari 2010)

Setelah dilakukan pemantauan tersebut selanjutnya dibuat laporan yang memuat informasi :

1. Kegiatan- kegiatan yang sedang dilaksanakan.
2. Pencapaian target fisik maupun anggaran yang telah terealisasi
3. Kendala dan permasalahan yang dihadapi termasuk tindak lanjutnya.
4. Gambaran I partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

Adapun mekanisme pelaporan yang dilakukan dalam pelaksanaan P2KP di Desa Purbayan menurut Koordinator BKM (24 Desember 2009) sebagai berikut :

BKM membuat pelaporan ke BKM dan kemudian BKM membuat pelaporan secara berjenjang. Pelaporan dibuat sangat sederhana mengingat kemampuan administrasi dari pelaku P2KP di tingkat desa

Hal tersebut dibenarkan oleh POKJA-POKJA BKM sebagai berikut :

Memang pelaporan dibuat sangat sederhana dan secara berjenjang dari POKJA-POKJA diserahkan ke BKM dan kemudian mengkompilasi pelaporan dari POKJA-POKJA sebagai laporan BKM ke Kabupaten melalui Faskel (wawancara januari 2010)

Untuk selanjutnya kegiatan pemeriksaan dan dilakukan untuk secara internal dan eksternal dengan tujuan agar kegiatan P2KP sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat. Kegiatan pemeriksaan internal dilakukan secara rutin oleh Faskel dan pemeriksaan eksternal oleh Tim auditor independen dan BPKP.

d. Tahap Pelestarian

Program P2KP pada prinsipnya harus dapat memberikan manfaat pada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*). Disamping

bermanfaat hasil kegiatannya, maka aspek sistem pemberdayaan harus member dampak perubahan yang positif terhadap kelanjutan program sesuai dengan tujuan P2KP.

Hal itu sesuai apa yang dikemukakan oleh Koordinator BKM bahwa :

Program P2KP ini harus berkelanjutan, karena program ini merupakan stimulant untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, sehingga hasil kegiatan P2KP harus merupakan sesuatu yang berkelanjutan. Untuk itu dalam pelaksanaan program diharapkan ada upaya dari warga masyarakat untuk menjaga kelestarian program tersebut (wawancara januari 2010)

Apa yang dikemukakan oleh Koordinator BKM tersebut diperkuat oleh Fasilitator Kelurahan/ Desa sebagai berikut :

Memang program P2KP harus diupayakan kelestariannya mengingat program ini merupakan program yang esensinya peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang melalui instusi lokal. Sehingga bagi desa yang telah mendapatkan program ini gagal dalam melaksanakan dan tidak mematuhi aturan yang ada maka akan mendapatkan sanksi bahwa desa tidak akan memperoleh dana P2KP untuk tahun berikutnya (wawancara januari 2010)

Namun demikian dalam tahap pelestarian program P2KP di Desa Purbayan belum dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Ketua Rt.02 Rw.01 sebagai berikut :

Kegiatan pembangunan fisik yang didanai oleh program P2KP pada umumnya setelah selesai program tidak ada kelanjutan kegiatan pembangunan fisik seperti apa yang diharapkan oleh program P2KP, hal ini karena pada pelaksanaan program swadaya yang berupa dana tunai maupun material relative kecil lebih cenderung swadaya berupa tenaga kerja, sehingga untuk kelanjutan program belum bias terwujud (wawancara januari 2010),

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Rt. 01 Rw.03

Program P2KP di desa Purbayan secara fisik telah berjalan, baik kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, kegiatan simpan pinjam maupun

kegiatan sosial, namun setelah program selesai, kegiatan di tiap KSM tidak berlanjut. Hal ini disebabkan karena ketergantungan pada dana yang ada (wawancara januari 2010)

Dari semua penjelasan tahap-tahap pelaksanaan program P2KP di atas secara keseluruhan bahwa pelaksanaan program P2KP di Desa Purbayan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun tidak semua bisa berhasil seperti yang diharapkan.. Tidak semua tahapan-tahapan pelaksanaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelestarian dapat dilakukan sesuai dengan rencana yang ada, khususnya pada tahap pelestarian. Hal ini tentu berkaitan dengan keberadaan hambatan yang ditemui. Namun demikian jika dilihat dari **aspek kepatuhan** pada atuiarn yang ada (juklak maupun juknis) maka secara umum dapat disimpulkan para pelaksana telah mematuhi apa yang ada dalam petunjuk pelaksanaan. Semua tahapan-tahapan telah direalisasikan dengan baik mulai dari perencanaan hingga pelestarian, meskipun dalam beberapa hal masih belum memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Sementara iutu untuk menjhelasakan tentang apa yang terjadi selama proses implementasi, berikut ini akan diidentifikasi berbagai factor yang dapat menghambat atau mendukung implementasi program tersebut.

Dari aspek tujuan, maka diantara kessleruhan tujuan P2KP di Desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya dapat tercapai yaitu antara lain :

1. Terbentuknya institusi lokal tingkat desa yang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan yaitu terbentuknya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).
2. Meningkatnya akses bagi masyarakat yang berupa sarana dan prasarana, pelayanan sosial serta pengembangan pendanaan simpan pinjam.
3. Terpeliharanya sifat kegotong-royongan dalam pembangunan sarana dan prasarana desa sebagai bentuk swadaya masyarakat.

Namun swadaya masyarakat dalam bentuk pendanaan secara mandiri untuk pengembangan program P2KP belum dapat terwujud.

C. Hambatan Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Program

Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan dalam kerangka pemikiran, maka upaya menjelaskan apa yang terjadi selama proses implementasi dilakukan dengan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada. Adapun untuk mengidentifikasi hal ini ditekankan pada hambatan yang berkaitan dengan beberapa hal yaitu : Standart program, sumber daya, komunikasi, sikap pelaksana, dan kondisi social ekonomi masyarakat. Untuk itu masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Hambatan yang berkaitan dengan standard program.

Dalam kaitannya dengan standard pelaksanaan program, dalam kenyataannya persoalan ini juga menjadi hambatan yang cukup dirasakan oleh pelaksana. Hal ini berkaitan dengan pedoman P2KP

yang kurang dipahami oleh para anggota KSM karena pedoman yang ada sangat rumit untuk dipelajari bagi anggota KSM yang pada umumnya tingkat pendidikan sangat terbatas.

Seperti apa yang dinyatakan ketua KSM Kenanga sebagai berikut :

Pedoman P2KP yang ada sulit untuk kami pahami, sehingga kami dalam melaksanakan program sering mengalami perbedaan penafsiran. Untuk kesamaan pemahaman kami mengadakan diskusi dengan KSM lain dan berkonsultasi dengan koordinator BKM. Meskipun ini merupakan satu solusi namun hal ini cukup mengganggu pelaksanaan kegiatan, paling tidak menunda pelaksanaan suatu kegiatan sebelum dikonsultasikan terlebih dahulu (wawancara januari 2010)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ketua KSM Menur sebagai berikut :

Kami mengalami kesulitan dalam memahami pedoman yang ada, sehingga kami dalam melaksanakan kegiatan P2KP harus sering konsultasi ke koordinator BKM dan juga diskusi dengan KSM lainnya. Hal ini cukup mengganggu pelaksanaan program, khususnya dalam hal penggunaan waktu sesuai jadwal yang direncanakan (wawancara januari 2010)

Mengingat program P2KP terdiri dari berbagai kegiatan dan tahapan-tahapan, maka petunjuk pelaksanaannya/ pedoman pelaksanaannya harus betul-betul dapat dipahami oleh seluruh pelaku P2KP. Apabila aturan petunjuk pelaksanaan tidak bisa menjamin keberhasilan pelaksanaannya maka tujuan program tidak akan efektif dan efisien. Hal itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Sutarto (1995:12), “Program adalah perumusan yang memuat gambaran pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan berikut petunjuk-petunjuk mengenai cara-cara pelaksanaannya”

Untuk itu agar pelaksanaannya sesuai yang diharapkan perlu diupayakan kejelasan standar pelaksanaan. Standar pelaksanaan yang berupa pedoman pelaksanaan program P2KP harus betul-betul dapat dipahami oleh para pelaku program P2KP, mengingat apabila mereka tidak memahami maka pelaksanaannya tidak akan mencapai sasaran program P2KP.

2. Hambatan Yang Berhubungan Dengan Sumber Daya

Hambatan yang berhubungan dengan sumber daya yang berupa dana lebih disebabkan karena ketergantungan warga akan dana program dan keterbatasan dana yang ada. Hal ini mengingat dana yang bersumber dari swadaya masyarakat sangat rendah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Fasilitator Kelurahan/ Desa sebagai berikut :

Tingkat swadaya masyarakat cukup tinggi dalam menunjang kegiatan pembangunan fisik namun swadaya tersebut lebih ditekankan pada swadaya tenaga kerja, sedang swadaya berupa sumbangan dana tunai sangat kecil. Dengan demikian ketergantungan pada dana dari program sangat tinggi (wawancara januari 2010)

Hal senada juga dikemukakan oleh petugas UPL sebagai berikut :

Kegiatan pembangunan fisik melalui program P2KP di Desa Purbayan cukup mendapat respon yang tinggi dari masyarakat karena didukung tenaga kerja swadaya masyarakat, namun dari segi swadaya berupa dana tunai dari masyarakat sangat kecil Masyarakat masih terlalu berharap pada besarnya dana dari program tersebut. Padahal program tersebut sangat terbatas dalam hal dananya (wawancara januari 2010).

Walaupun swadaya masyarakat berupa tenaga kerja cukup tinggi namun apabila dukungan dana dari swdaya sangat kecil maka akan berpengaruh pada pelaksanaannya. Hal ini tentu berdampak pada pelaksanaannya. Namun demikian untuk mengatasi hal tersebut upaya

dilakukan oleh BKM adalah menyeleksi secara ketat terhadap proposal yang diajukan KSM ke BKM dengan melihat rasionalitas perbandingan swadaya masyarakat yang berupa tenaga kerja dengan yang berupa material maupun dana tunai.

Seperti yang dikemukakan oleh Koordinator BKM sebagai berikut :

Untuk mengetahui apakah proposal yang diajukan oleh KSM rasional dan sesuai kebutuhan masyarakat maka BKM meneliti tingkat swadaya yang diajukan oleh KSM baik swadaya berupa tenaga kerja maupun material atau dana tunai. Hal ini dilakukan agar kegiatan yang dilakukan tersebut betul-betul sesuai dengan tujuan program P2KP (wawancara januari 2010)

Dari pernyataan diatas nampak bahwa persoalan dana masih menjadi salah satu kendala untuk dapat mengimplementasikan program, mengingat dana yang disediakan sangat terbatas, yang tak seimbang dengan proposal pembangunan yang diajukan oleh kelompok swadaya masyarakat.

3. Hambatan Yang Berhubungan Dengan Komunikasi

Hambatan lain yang dirasakan dalam pelaksanaan program P2KP adalah persoalan komunikasi. Kurang lancarnya komunikasi antara masyarakat dengan pelaku P2KP merupakan penghambat proses pelaksanaan kegiatan P2KP. Kurangnya komunikasi tersebut sejak tahap perencanaan hingga pelaporan.

Dalam tahap perencanaan, banyak masyarakat yang belum mengenal program P2KP karena keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi sebagai media untuk mensosialisasikan P2KP. Hal ini dibenarkan salah satu ketua RT sebagai berikut :

Informasi tentang P2KP tidak sampai ke seluruh anggota masyarakat desa Purbayan, sehingga banyak anggota masyarakat kurang mengenal program P2KP, hal ini dikarenakan sosialisasi yang dilakukan kurang merata ke seluruh warga.(wawancara januari 2010)

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua KSM Menur sebagai berikut :

Di wilayah RT kami walaupun telah terbentuk KSM namun informasi tentang program P2KP belum semua anggota masyarakat mengenal program P2KP sehingga hal ini mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan P2KP (wawancara januari 2010).

Persoalan komunikasi khususnya antara pelaksana dengan asaran juga terjadi pada saat pemantauan dan pelestarian., sehingga wajar jika untuk kegiatan pelestariannya cenderung belum bisa berjalan sesuai harapan.

Meskipun demikian guna mengatasi hambatan komunikasi antara warga masyarakat dengan pelaku P2KP, sesuai apa yang dikatakan

BKM sebagai berikut :

Dalam rangka upaya mengatasi hambatan komunikasi antara warga masyarakat dengan para pelaku P2KP kami senantiasa mengadakan pertemuan baik secara formal maupun informal dengan warga masyarakat maupun pengurus RT untuk membicarakan tentang program P2KP. Disamping itu kami membuat papan informasi mengenai kegiatan P2KP di tempat-tempat strategis. (wawancara januari 2010)

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa Purbayan sebagai berikut :

Agar anggota masyarakat dapat mengetahui adanya program P2KP, informasi tentang program P2KP disampaikan tidak hanya melalui pertemuan sosialisasi secara formal namun perlu pertemuan secara informal oleh para pelaku P2KP dan disamping itu dibuat papan informasi di tempat-tempat yang strategis.(wawancara januari 2010)

Komunikasi yang kurang jelas dapat menyebabkan terjadinya salah persepsi diantara pelaku P2KP dengan anggota masyarakat sehingga

dapat menimbulkan penyimpangan terhadap pelaksanaan program. Kondisi ini akan nampak pada saat penyusunan laporan, dimana hamper sebagian besar KSM belum mampu membikin laporan secara benar. Ini dinyatakan oleh Faskel sebagai berikut :

Kurangnya komunikasi telah menyebabkan proses pembuatan laporan banyak ditemukan kesalahan. Ini disebabkan karena pengurus KSM tak mau bertanya atau berkonsultasi terlebih dahulu dengan pihak Fasilitator guna mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaporan (wawancara januari 2010)

Hal tersebut dibenarkan oleh salah seorang pengurus KSM Menurut sebagai berikut :

Memang kami dalam membuat laporan kurang berkonsultasi dengan Fasilitator. Disamping karena malas harus mencari faskel yang agak susah juga karena menurut saya yang penting kegiatan kita laporkan apa adanya dan kita tidak melakukan penyimpangan, sehingga tak perlu harus formal dan procedural (wawancara januari 2010)

Disamping itu juga menimbulkan kurang adanya dukungan partisipasi masyarakat.

4. Hambatan Yang Berhubungan Dengan Sikap Pelaksana

Selain hambatan yang muncul pada pedoman pelaksanaan, sumber daya, dan komunikasi juga muncul dari faktor sikap pelaksana. Sikap pelaksana yang kurang memahami akan program P2KP sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Hal ini nampak dalam pengambilan keputusan penentuan pencairan dana oleh para pelaku P2KP yang terlihat tidak tegas dan lebih didasarkan pada factor sosial kemasyarakatan seperti adanya hubungan pertemanan maupun

persaudaraan. Hal ini seperti apa yang dinyatakan oleh Ketua RT.01

RW.01 sebagai berikut::

Dalam pengajuan proposal baik untuk pembangunan fisik maupun bantuan ekonomi dan sosial sering petugas UPL, UPK atau UPS kurang teliti dan kurang tegas sehingga kegiatan pembangunan fisik atau pemberian bantuan pinjaman untuk usaha ekonomi produktif maupun bantuan social tidak proposioanl ada RT yang sama sekali tidak mendapatkan paket kegiatan apapun namun dilain pihak ada RT yang mendapat beberapa paket kegiatan. Hal ini karena ada unsur kedekatan teman atau masih ada hubungan keluarga (wawancara Desember 2009).

Hal tersebut senada yang dikemukakan oleh Ketua RT.06 RW.01 sebagai berikut :

Program P2KP di desa Purbayan belum merata hal ini karena petugas yang terlibat dalam BKM kurang obyektif dalam menentukan prioritas kegiatan sehinsbga ada wilayah RT yang sama sekali tidak mendapatkan paket kegiatan namun ada wilayah RT yang mendapatkan beberapa paket kegiatan (wawancara Desember 2009).

Perlu diketahui bahwa pelaku P2KP di desa merupakan anggota masyarakat yang kadang mereka kurang memahami tugas dan fungsi masing-masing, sementara pada sisi yang lain unsur hubungan social masih kuat . Dengan factor social kemasyarakatan yang demikian maka kadang mereka dalam mengambil keputusan lebih cenderung mengutamakan perasaan social seperti kekerabatan atau petemanan dibanding dengan atas dasar tugas dan fungsi yang harus dilakukan. Hal ini nampak sekali dalam hal pengambilan keputusan untuk meminjam di Unit Simpan Pinjam. Banyak warga yang mengeluh jika pengelola sangat subyektif dalam menentukan siapa yang berhak

memperoleh pinjaman. Hal ini seperti dikemukakan oleh salah seorang warga masyarakat sebagai berikut :

Untuk keputusan pemberian pinjaman saya melihat jika pengurus sangat subyektif. Mereka yang kebetulan ada hubungan saudara atau pertemanan relative lebih mudah untuk memperoleh bantuan pinjaman dibandingkan yang lain. Hal ini mau tak mau menimbulkan kecemburuan pada warga yang lain dan menimbulkan kesan tidak adil (wawancara desember 2009)

Tentang hal ini seorang pengurus Unit simpan pinjam menyatakan sebagai berikut :

Memang hal itu mungkin kami lakukan. Itu semata-mata untuk menyelamatkan dan melestarikan dana agar bisa bergulir terus dan bermanfaat untuk seluruh warga. Jika kami tak hati-hati dan ternyata jatuh pada orang yang salah maka dana tentu akan habis. Kalau sudah begini biasanya pengurus yang disalahkan (wawancara desember 2009)

Dari apa yang diungkapkan di atas maka nampak bahwa sikap yang tegas dari para pelaksana terhadap program sangat diperlukan, karena apabila mereka tidak tegas dalam mengambil suatu keputusan maka pelaksanaan kegiatan akan berjalan kurang efektif bahkan akan gagal .

5. Hambatan Yang Berhubungan Dengan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Sesuai dengan uraian sebelumnya dikatakan bahwa tingkat swadaya masyarakat berupa dana tunai dari masyarakat sangat kecil ini merupakan salah satu faktor hambatan yang berhubungan kondisi social ekonmi masyarakat. Kondisi tersebut telah menyebabkan pelestarian program fisik menjadi tak berjalan seperti yang diharapkan.

Disamping itu bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat juga mempengaruhi pengembalian angsuran terhadap bantuan simpan pinjam yang telah diserahkan kepada masyarakat melalui KSM. Dana yang mereka terima kadang-kadang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, bukan untuk modal usaha ekonomi produktif.

Hal ini seperti dikemukakan oleh petugas UPK yang menyatakan sebagai berikut:

Mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada termasuk ekonomi lemah dan masih banyak kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi dibanding dengan penghasilan sehingga ada anggota KSM yang mengalami kebangkrutan usahanya yang berakibat angsuran pinjaman mengalami keterlambatan (wawancara 15 desember 2009).

Hal tersebut dibenarkan oleh Koordinator BKM dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 16 Desember 2009, sebagai berikut:

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Purbayan termasuk golongan ekonomi lemah sehingga ada anggota masyarakat yang mendapatkan bantuan modal usaha ekonomi produktif tidak bisa mengembangkan usahanya yang berakibat angsuran pinjaman mengalami keterlambatan.

Upaya untuk mengilimnir keterlambatan dalam angsuran pinjaman maka monitoring dilakukan secara intensif oleh petugas UPK terhadap KSM yang telah menerima bantuan simpan pinjam.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan program P2KP, hal ini berkaitan dengan seberapa besar sumber daya yang ada baik dalam bentuk materi maupun dana yang diberikan untuk mendukung kegiatan P2KP.

Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh satu faktor namun ditentukan berbagai faktor termasuk factor kondisi social ekonomi masyarakat.

Dari keseluruhan hambatan yang ada, maka hambatan sumberdaya manusia yaitu sikap pelaksana yang kurang memahami akan program P2KP dan tingkat pendidikan yang sangat terbatas dirasa paling menonjol dibanding dengan hambatan yang lain.

D. Pembahasan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dalam penelitian, selanjutnya akan dilakukan analisis pembahasan dengan mengacu pada konsep implementasi yang dikembangkan oleh Ripley dan Franklin (1986) sesuai dengan Kerangka pikir yang dikembangkan dalam penelitian ini. Menurut Ripley & Franklin untuk melakukan studi implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan dua hal yaitu *pertama*, melihat bagaimana kepatuhan pelaksanaan atas standard aturan yang ada dan *kedua*, berusaha mendeskripsikan apa yang terjadi selama proses implementasi tersebut.

Dari temuan penelitian maka dapat dikatakan bahwa implementasi program P2KP di desa Purbayan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Berdasarkan konsep Ripley dan Franklin tersebut untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan maka ada dua hal yang harus dijelaskan yaitu tentang kepatuhan pelaksana atas

juklak dan juknis serta mendeskripsikan apa yang terjadi selama proses implementasi berlangsung.

Dari aspek kepatuhan, para pelaksana telah melaksanakan semua yang tertuang dalam petunjuk pelaksanaan. Ini terlihat dari telah dilakukannya tahapan-tahapan proses implementasi mulai dari perencanaan, pengendalian, pelestarian maupun pelaporan seperti yang tertuang dalam aturan pelaksanaan. Meskipun dari sisi output ada beberapa tahapan yang kurang memperoleh hasil yang diharapkan akan tetapi setelah dilaksanakannya segala ketentuan yang harus dilakukan menunjukkan bahwa ada kepatuhan pelaksana atas aturan pelaksanaan yang ada walaupun hambatan yang paling menonjol sumberdaya manusia.

Sementara itu dari perspektif jawaban pertanyaan “apa yang terjadi selama proses implementasi”, peneliti melakukannya dengan melakukan analisis factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, dengan mengacu pada kombinasi model-model top down dari Grindle, Van Meter & Van Horn, Edwards Iii serta Sabatier & Mazmanian.. Analisis factor penghambat yang peneliti identifikasi dengan mengacu pada model-model tiop down yang ada juga menunjukkan bahwa factor-faktor yang ditunjuk dalam model-model tersebut juga sangat mempengaruhi kinerja imlementasi. Diantaranya adalah kejelasan standard aturan, sumber dya, komunikasi, sikap pelaksanaan serta kondisi social ekonomi masyarakat. Ini berarti bahwa model-model topdown yang dipilih juga berlaku dalam hal implementasi program P2KP di desa Purbayan kecamatan Baki, kabupaten Sukoharjo. Dengan

demikian secara keseluruhan konsep Ripley dan Franklin ternyata telah diimplemmentasikan secara benar oleh pihak pelaksana program.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses implementasi Program P2KP di desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan sesuai dengan standard aturan yang ditetapkan yaitu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Keseluruhan tahapan-tahapan telah dilakukan sesuai dengan juklak. Ini menunjukkan adanya kepatuhan pelaksana pada turan pelaksanaan yang ada. Namun demikian selama pelaksanaan masih terjadi hal-hal yang belum sesuai dengan harapan, sehingga hasil yang diperolehpun juga belum bias maksimal. Ini disebabkan karena berbagai hal. Diantaranya adalah keterbatasan dalam hal petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis telah menyebabkan keseluruhan proses perencanaan hingga pelaporan terlihat belum memperoleh hasil yang diharapkan. Demikian juga dengan munculnya berbagai hambatan juga diidentifikasi sebagai factor yang menjadikan proses implementasi belum memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Secara lebih terperinci maka hasil penelitian tersebut dikemukakan sebagai berikut :

1. Dari keseluruhan tahapan yang harus dilalui mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, pelestarian dan pelaporan, meski sudah dilaksnakan, namun masih ditemukan yang belum dilaksanakan

secara optimal. Tahap pelestarian misalnya belum bisa dilaksanakan mengingat berbagai keterbatasan yang ada seperti keterbatasan sumber dana, mengingat swadaya yang dilakukan oleh warga sebagian besar hanya berupa bantuan tenaga.

2. Dari sisi kepatuhan, sebenarnya para pelaksana telah cukup mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan program tersebut. Namun demikian berbagai hambatan yang muncul telah menyebabkan pelaksanaannya belum menghasilkan output yang diharapkan.
3. Sejumlah hambatan ditemukan dalam proses implementasi program P2KP ini. Diantaranya adalah hambatan ketidakjelasan tentang aturan pelaksanaan, hambatan komunikasi, hambatan sumber daya khususnya dana, hambatan sikap pelaksana yang cenderung subyektif serta hambatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun demikian berbagai hambatan tersebut dalam pelaksanaannya telah bisa diatasi dengan baik.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Mengingat bahwa penelitian yang dilakukan lebih menitikberatkan pada penelitian deskriptif yang menekankan pada pendekatan proses, maka tentu saja penelitian ini hanya mampu mendeskripsikan hal-hal yang dilakukan pada saat proses pelaksanaan berlangsung. Hal itu

ditambah lagi dengan keterbatasan kemampuan peneliti dalam penggunaan teori dimana indikator yang digunakan sengaja dipilih dari beberapa teori yang ada, hal ini tentu membawa implikasi bahwa hasil penelitian ini kurang bisa mengidentifikasi factor-faktor lain di luar yang dipilih peneliti, yang mempengaruhi proses implementasi.

2. Implikasi praktis

Mengingat masih ditemukannya ketidakjelasan dalam aturan pelaksanaan maka hal ini tentu akan membawa sejumlah implikasi diantaranya adanya kecenderungan pelaksanaan yang sedikit menyimpang dari juklak tersebut. Namun demikian jika menginginkan pelaksanaan berjalan dengan baik maka meski output yang diraih belum optimal namun pelaksanaannya harus mengacu pada juklak atau dengan kata lain bahwa kepatuhan akan juklak merupakan sesuatu yang sangat penting agar proses implementasi itu sendiri dapat dikatakan berhasil. Dan itu telah dilakukan oleh para pelaksana di desa Purbayan, kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo

C. Saran-saran

Sejumlah saran diajukan untuk melengkapi hasil penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Perlu adanya kejelasan aturan pelaksanaan sehingga tidak membingungkan para pelaksananya. Ini juga dalam rangka menghilangkan subyektivitas dan pertimbangan-pertimbangan pribadi

yang sering muncul khususnya dalam hal pelaksanaan simpan pinjam sehingga bias menjauhkan dari kecemburuan social dan perasaan tidak adil bagi warga.

2. Perlu dilakukan optimalisasi peran pelaksana mulai dari pelaksanaan fungsi sosialisasi, hingga tanggung jawab untuk melstarikan kegiatan sehingga tidak ada kesan program hanya pemberian semata yang tidak ada kesinambungannya.



Daftar Pustaka

- AG Subarsono, 2006, *Analisis kebvijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktek* Pustaka pelajar, Yogyakarta
- Anderson, James E, 1979, *Public Policy Making*, Mac Millan, Publish, New jersey.
- Edwards III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington DC.
- Dunn, William N, 1995, *Analisis Kebijakan Publik*, edisi terjemahan, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Grindle, Merilee S., 1980, *Politics and Policy Implementation in The Thirrd World*, Princeton University Press, New Yersey.
- HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Korten, David C, 2002, *Menuju abad 21, tindakan sukarela dan agenda global*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rudakarya, Bandung.
- Loekman Sutrisno, 1997, *Kemiskinan, Perempuan dan pemberdayaan*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- M Irfan Islamy, 1997, *Perumusan kebijaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Matthew B Miles & A Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.
- Meter Donald S Vanb and Carl E Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process; A Conceptual Framework*, Sage publication, Beverly Hills.
- Muhajir Darwin, 1994, *Kebijaksanaan Publik*, Buku Pegagan Kuliah, UNS Press, Surakarta, 1994.
- Payne, Malcolm, 1997, *Modern Social Work Theory*, London, Mac Milland, Second edition.

Pranarka, AMW & Moeljarto, Vindyadika, 1996, *Pemberdayaan (Empowerment) konsep dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.

Riant Nugroho, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara sedang berkembang*, Gramedia, Jakarta.

Ripley, Randall B & Franklyn, Grace A., 1986, *Policy Implementation and Bureaucracy*, The Dorsey Press, Chicago.

Samodra Wibowo, 1994, *Evaluasi Kebijakan*, PT Grafindo Persada Jakarta.

Solikhin Abdulwahab, 1990, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Malang.

_____, 1991, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.

Y Slamet, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Sebelas maret University Press, Surakarta.

Sumber-sumber lain :

The World Bank Office, *Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta

Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Cipta karya, *petunjuk pelaksanaan P2KP*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses implementasi Program P2KP di desa Purbayan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan sesuai dengan standard aturan yang ditetapkan yaitu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Keseluruhan tahapan-tahapan telah dilakukan sesuai dengan juklak. Hal ini menunjukkan adanya kepatuhan pelaksana pada turan pelaksanana yang ada. Namun demikian selama pelaksanaan masih terjadi hal-hal yang belum sesuai dengan harapan, sehingga hasil yang diperolehpun juga belum bisa maksimal, karena disebabkan oleh berbagai hal. Diantaranya adalah keterbatasan dalam hal petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis telah menyebabkan keseluruhan proses perencanaan hingga pelaporan terlihat belum memperoleh hasil yang diharapkan. Demikian juga dengan munculnya berbagai hambatan juga diidentifikasi sebagai faktor yang menjadikan proses implementasi belum memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Secara lebih terperinci maka hasil penelitian tersebut dikemukakan sebagai berikut :

1. Dari keseluruhan tahapan yang harus dilalui mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, pelestarian dan pelaporan, meski sudah dilaksnakan, namun masih ditemukan yang belum dilaksanakan

secara optimal. Tahap pelestarian misalnya belum bisa dilaksanakan mengingat berbagai keterbatasan yang ada seperti keterbatasan sumber dana, mengingat swadaya yang dilakukan oleh warga sebagian besar hanya berupa bantuan tenaga.

2. Dari sisi kepatuhan, sebenarnya para pelaksana telah cukup mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan program tersebut. Namun demikian berbagai hambatan yang muncul telah menyebabkan pelaksanaannya belum menghasilkan output yang diharapkan.
3. Sejumlah hambatan ditemukan dalam proses implementasi program P2KP ini. Diantaranya adalah hambatan ketidakjelasan tentang aturan pelaksanaan, hambatan komunikasi, hambatan sumber daya khususnya dana, hambatan sikap pelaksana yang cenderung subyektif serta hambatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Meskipun demikian berbagai hambatan tersebut dalam pelaksanaannya telah bisa diatasi dengan baik.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Mengingat bahwa penelitian yang dilakukan lebih menitikberatkan pada penelitian deskriptif yang menekankan pada pendekatan proses, maka tentu saja penelitian ini hanya mampu mendeskripsikan hal-hal yang dilakukan pada saat proses pelaksanaan berlangsung. Hal itu

ditambah lagi dengan keterbatasan kemampuan peneliti dalam penggunaan teori dimana indikator yang digunakan sengaja dipilih dari beberapa teori yang ada, hal ini tentu membawa implikasi bahwa hasil penelitian ini kurang bisa mengidentifikasi faktor-faktor lain di luar yang dipilih peneliti, yang mempengaruhi proses implementasi.

2. Implikasi praktis

Mengingat masih ditemukannya ketidakjelasan dalam aturan pelaksanaan maka hal ini tentu akan membawa sejumlah implikasi diantaranya adanya kecenderungan pelaksanaan yang sedikit menyimpang dari juklak tersebut. Namun demikian jika menginginkan pelaksanaan berjalan dengan baik maka meski output yang diraih belum optimal namun pelaksanaannya harus mengacu pada juklak atau dengan kata lain bahwa kepatuhan akan juklak merupakan sesuatu yang sangat penting agar proses implementasi itu sendiri dapat dikatakan berhasil. Dan itu telah dilakukan oleh para pelaksana di desa Purbayan, kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo

C. Saran

Sejumlah saran diajukan untuk melengkapi hasil penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Perlu adanya kejelasan aturan pelaksanaan sehingga tidak membingungkan para pelaksananya. Ini juga dalam rangka menghilangkan subyektivitas dan pertimbangan-pertimbangan pribadi

yang sering muncul khususnya dalam hal pelaksanaan simpan pinjam sehingga bias menjauhkan dari kecemburuan social dan perasaan tidak adil bagi warga.

2. Perlu dilakukan optimalisasi peran pelaksana mulai dari pelaksanaan fungsi sosialisasi, hingga tanggung jawab untuk melstarikan kegiatan sehingga tidak ada kesan program hanya pemberian semata yang tidak ada kesinambungannya.
3. Dalam rangka optimalisasi peran pelaksana maka perlu dibentuk forum komunikasi antara BKM, KSM dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) Unit Pengelola Lingkungan (UPL) dan Unit Pengelola Sosial (UPS) sebagai wadah tukar pikiran dan penambahan pengetahuan bidang penanggulangan kemiskinan. Disamping itu perlu diadakan Diklat bagi para pelaksana.

Daftar Pustaka

- AG Subarsono, 2006, *Analisis kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktek* Pustaka pelajar, Yogyakarta
- Anderson, James E, 1979, *Public Policy Making*, Mac Millan, Publish, New jersey.
- Dunn, William N, 1995, *Analisis Kebijakan Publik*, edisi terjemahan, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Edwards III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington DC.
- Grindle, Merilee S., 1980, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey.
- Harry Hikmat, 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Hunaniora Utama Press, Bandung
- HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Ife, Jim. 1995, *Community Development: Creating alternatives-vision, analysis and practice*, Australia, Longman Pty Ltd
- Korten, David C, 2002, *Menuju abad 21, tindakan sukarela dan agenda global*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rudakarya, Bandung.
- Loekman Sutrisno, 1997, *Kemiskinan, Perempuan dan pemberdayaan*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- M. Amien Rais, 1995, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media Yogyakarta
- M Irfan Islamy, 1997, *Perumusan kebijaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Matthew B Miles & A Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.

- Meter Donald S Vanb and Carl E Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process; A Conceptual Framework*, Sage publication, Beverly Hills.
- Muhajir Darwin, 1994, *Kebijaksanaan Publik*, Buku Pegangan Kuliah, UNS Press, Surakarta, 1994.
- Payne, Malcoln, 1997, *Modern Social Work Theory*, London, Mac Milland, Second edition.
- Pranarka, AMW & Moeljarto, Vindyadika, 1996, *Pemberdayaan (Empowerment) konsep dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Riant Nugroho, 2006, *Kebijakan 113 Untuk Negara sedang berkembang*, Gramedia, Jakarta.
- Ripley, Randall B & Franklyn, Grace A., 1986, *Policy Implementation and Bureaucracy*, The Dorsey Press, Chicago.
- Samodra Wibowo, 1994, *Evaluasi Kebijakan*, PT Grafindo Persada Jakarta.
- Solikhin Abdulwahab, 1990, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Malang.
- _____, 1991, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Y Slamet, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Sebelas maret University Press, Surakarta.

Sumber-sumber lain :

- The World Bank Office, *Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, jakrta
- Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Cipta karya, *petunjuk pelaksanaan P2KP*.



Daftar Pustaka

- AG Subarsono, 2006, *Analisis kebvijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktek* Pustaka pelajar, Yogyakarta
- Anderson, James E, 1979, *Public Policy Making*, Mac Millan, Publish, New jersey.
- Dunn, William N, 1995, *Analisis Kebijakan Publik*, edisi terjemahan, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Edwards III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington DC.
- Grindle, Merilee S., 1980, *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Yersey.
- Harry Hikmat, 2001, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Hunaniora Utama Press, Bandung
- HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Ife, Jim. 1995, *Community Development: Creating alternatives-vision, analysis and practice*, Australia, Longman Pty Ltd
- Korten, David C, 2002, *Menuju abad 21, tindakan sukarela dan agenda global*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Lexy J Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rudakarya, Bandung.
- Loekman Sutrisno, 1997, *Kemiskinan, Perempuan dan pemberdayaan*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- M. Amien Rais, 1995, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Aditya Media Yogyakarta
- M Irfan Islamy, 1997, *Perumusan kebijaksanaan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Matthew B Miles & A Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.

- Meter Donald S Vanb and Carl E Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process; A Conceptual Framework*, Sage publication, Beverly Hills.
- Muhajir Darwin, 1994, *Kebijaksanaan Publik*, Buku Pegangan Kuliah, UNS Press, Surakarta, 1994.
- Payne, Malcolm, 1997, *Modern Social Work Theory*, London, Mac Milland, Second edition.
- Pranarka, AMW & Moeljarto, Vindyadika, 1996, *Pemberdayaan (Empowerment) konsep dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Riant Nugroho, 2006, *Kebijakan 113 Untuk Negara sedang berkembang*, Gramedia, Jakarta.
- Ripley, Randall B & Franklyn, Grace A., 1986, *Policy Implementation and Bureaucracy*, The Dorsey Press, Chicago.
- Samodra Wibowo, 1994, *Evaluasi Kebijakan*, PT Grafindo Persada Jakarta.
- Solikhin Abdulwahab, 1990, *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Rineka Cipta, Malang.
- _____, 1991, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Y Slamet, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Sebelas maret University Press, Surakarta.

Sumber-sumber lain :

- The World Bank Office, *Era Baru Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, jakrta
- Departemen Pekerjaan Umum, Ditjen Cipta karya, *petunjuk pelaksanaan P2KP*.

